

BELUM DIKOREKSI



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI V DPR RI DENGAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

Tahun Sidang	: 2018 – 2019
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Rabu, 5 September 2018
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 15.15 WIB s.d 18.35 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI.
Acara	: Membahas RKA-K/L Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam nota Keuangan RAPBN TA 2019
Ketua Rapat	: Ir. Sigit Sosiantomo
Sekretaris	: Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota	: dari 51 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salah sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI.

Yang terhormat saudara Menteri Desa dan PDT Transmigrasi beserta seluruh jajarannya.

Dan para hadirin yang kami muliakan.

Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhana Watta Alla yang melimpahkan rahmat dan karunia kita, sehingga pada hari ini, kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab konstitusional kita dalam rapat anggaran dalam keadaan sehat walafiat, berdasarkan informasi dari sekretariat.

Alhamdulillah sudah hadir anggota Komisi V DPR RI ditandatangani sebanyak 25 orang, 8 Fraksi memenuhi kuorum oleh karena itu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 245 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkanlah saya membuka rapat pada hari ini dengan mengucapkan *Bissmilahirrahmanirahim* kita nyatakan rapat ini terbuka untuk umum.

Kami ucapkan terima kasih (rekaman tidak jelas) kepada pak Menteri Desa PDT Transmigrasi beserta seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami pada rapat hari ini, saudara Menteri dan para anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati, sesuai dengan surat badan anggaran DPR RI nomor AG/12626/DPR RI/7/2018 tanggal 24 Juli 2018 perihal penyampaian rancangan jadwal pembicaraan tingkat I, pembahasan RUU tentang APBN tahun 2019 untuk pembahasan tahap pertama, rencana kerja dan anggaran Kementerian lembaga mitra kerja, setiap Komisi V DPR RI dialokasikan waktu pada tanggal 4 sampai 14 September 2018.

Yang hasil pembahasannya disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran DPR RI untuk sinkronisasi, selanjutnya pembahasan tahap kedua, untuk penyesuaian RKAKL dialokasikan waktu pada tanggal 28 September sampai 5 Oktober 2018, oleh karena itu terkait dengan pembahasan RKAKL kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2019 pada hari ini perlu kiranya kita bangun kesepahaman bersama, bahwa Rapat kerja pada hari ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2019 yang telah kita laksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2018 lalu.

Dalam kesempatan Rapat kerja hari ini, kita bisa lebih fokus dalam hal bagaimana program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya serta program-program yang dibutuhkan masyarakat pada khususnya di daerah atau kota, kabupaten, sebagaimana terdapat usulan

saran yang disampaikan Komisi V DPR RI dalam rapat yang terdahulu, mungkin bisa diakomodasi dan direalisasikan pagu anggaran nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2019.

Baiklah hadirin sebelum kita membahas lebih lanjut, acara pada hari ini perlu kiranya saya informasikan terlebih dahulu, bahwa dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2019 yang disepakati dalam Rapat kerja dengan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi pada tanggal 6 Juni 2018 dan pagu nota keuangan RAPBN tahun 2019 adalah sebagai berikut, kementerian pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, pagu kebutuhan, kesimpulan Rapat kerja 6 Juni 2018 adalah 4,5 atau 4 trilyun 545 milyar 623 juta 104 ribu rupiah.

Sementara pagu indikatif hasil kesimpulan Rapat kerja sama, 4 trilyun 545 milyar 623 juta 104 ribu rupiah, pagu anggaran nota keuangan RAPBN tahun 2019, sama, berkurang 4 trilyun 325 milyar 623 juta 104 ribu rupiah, jadi ada selisih 220 ya. Selisih 220 milyar, angka dalam juta maupun rupiahnya, maaf angka dalam juta maupun ribunya sama.

Saudara Menteri Desa PDT dan Transmigrasi serta para anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati, demikian pengantar dari kami, bahan dan rincian yang tadi sudah saya sebutkan ada di depan Bapak Ibu semua.

Oleh karena itu, kami minta kepada pak Menteri Desa PDT dan Transmigrasi untuk memberikan penjelasan tentang pokok kebijakan rencana kerja dan anggaran kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2019 sebagaimana yang saya sebutkan tadi, selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada pak Menteri untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan rapat kita ini, silakan pak Menteri kami berikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.

MENTERI DESA DAN PDT:

Terima kasih.

saya kira ada catatan-catatan pada saat kita RDP akhir pak, mungkin ini nanti perlu penegasan dari pak Menteri, pertama, catatan agar presentasi dari Kementerian Desa PDT ini itu menggambarkan dari masing-masing Eselon I berkaitan dengan program-program yang dilaksanakan di setiap daerah, itu satu pak, kalau saya lihat dari matrik atau materi yang sudah di... ini sudah tergambarkan dari pekerjaan rumah kita pak, yang catatan kedua adalah bagaimana dari matrik yang sudah ada ini, kemudian beberapa usulan dari para anggota dalam Rapat kerja maupun RDP kemarin itu, bisa di sinkronisasikan dengan lokasi-lokasi dari usulan yang sudah disampaikan ini pak, itu mekanisme itu yang harus disampaikan sebagai kebijakan pak Menteri, dan yang ketiga adalah bagaimana agar instruksi dari pak Menteri dalam setiap Rapat kerja pak Menteri ini punya komitmen untuk bisa kerja dari program di daerah dapat diketahui oleh anggota, kemudian juga anggota bisa bersama-sama dengan kementerian Desa untuk bisa mengawal program itu di daerah pemilihan masing-masing.

Ini sebenarnya dari 3 komitmen ini dari catatan yang disampaikan RDP kemarin yang kita tunda pak, pak Menteri Desa memberikan kebijakan ini, saya kira teknisnya kita akan bahas lagi dengan para Eselon I, ini saya lihat sudah ada ini, tinggal bagaimana ini mensinkronkan dengan usulan-usulan dari para anggota yang belum nampak dicatat ini.

Saya kira itu pak Sigit, supaya nyambung dari kita punya ... karena ini adalah bagian dari pembahasan kita, satu rangkaian pak, terima kasih pak Sigit, saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Mengingatkan kepada kita tentang terakhir dengan pak Menteri PDT dan saya juga melaporkan pada kondisi real dilapangan, bantuan BUM Des, sebagian cair sebagian belum mohon perlu ada penjelasan, kalau memang semua sudah dan pak ... bisa meyakinkan, kami sangat bergembira dan berterima kasih sekali, karena program itu sangat bermanfaat bagi masyarakat didesa, mereka tumbuh interpreneurship mereka dan Pemerintah memberikan apa namanya triger dana yang cukup dan mudah-mudahan program ini ada lagi kedepan, silakan pak Menteri, selanjutnya mungkin nanti teman-teman Komisi V DPR RI akan melakukan pendalaman setelah penjelasan pak Menteri Desa dan PDT, silakan, terima kasih.

F-PAN (H. SUNGKONO):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim.

Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan sidang, pimpinan Komisi V DPR RI dan seluruh anggota Komisi V DPR RI yang sangat saya hormati dan saya banggakan.

Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan diadakan pembahasan RKAKL dalam nota keuangan anggaran RAPBN tahun 2019, bapak-bapak ibu-ibu dan pimpinan yang saya hormati, sesuai dengan sasaran pembangunan desa daerah tertinggal dan transmigrasi dalam RPJM 2015 sampai dengan 2019, kita ada beberapa program sasaran yang harus dicapai dalam RPJM tersebut, yang pertama adalah pembangunan desa dan pedesaan.

Yaitu nomor 1 mengurangi desa tertinggal sebanyak 5000 desa, ini kita masih menunggu hasil dari BPS, BPS sekarang mengadakan sensus dan mudah-mudahan bulan Oktober atau November nanti bisa dirilis tetapi dari data internal kita bisa bekerjasama dengan sosiolog dari beberapa perguruan tinggi, kita sudah memenuhi angka, cuma ini angka internal yang bukan angka resmi, angka resmi nanti dari BPS, makanya saya kasih angka instan, bahwa ini angka internal, kemudian mudah-mudahan tercapai,

kemudian meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 22 ribu desa, mudah-mudahan tercapai juga, pak Ketua, kemudian 39 pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan keterkaitan kota dan desa itu ada 39 kawasan, yang menjadi target sudah tercapai 38 dan kurang satu kawasan, mudah-mudahan tercapai di tahun 2019, kemudian mengenai pembangunan daerah tertinggal dalam RPJM kita diingatkan untuk mengentaskan 80 desa tertinggal, sekarang sudah terentaskan 59, masih kurang 21, kita masih ada strugling yang kemungkinan ada 7 kawasan 7 kabupaten yang agak berat, tetapi kita coba usahakan agar di tahun 2019 bisa tercapai dengan program... dengan melibatkan stakeholder dan sebagainya, seperti dunia usaha dan sebagainya, karena kalau dari dana kita, kita persilakan masih ada 7 kabupaten yang mungkin bisa tidak terentaskan (rekaman tidak jelas) jadi kita coba melalui program...

Kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di daerah tertinggal, itu dari target apa namanya 6,9 sampai 7,21 saat ini baru 5,27 ya, mudah-mudahan dengan program ... juga bisa lebih mengakselerasi lagi tetapi dengan keadaan ekonomi yang sekarang, mungkin nanti kita akan coba (rekaman tidak jelas) agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.

Kemudian yang keenam menurunnya presentasi penduduk miskin di daerah tertinggal dari target menjadi 15 sampai 15,5 saat ini sudah tercapai 18,04%. Yang ketujuh meningkatkannya indeks pembangunan manusia di daerah tertinggal dari target 62,7 sudah tercapai 60,53 indeksinya, kemudian untuk pembangunan ketransmigrasian terbangunnya dan berkembangnya kawasan yang berfokus pada 72 satuan pemukiman, menjadi pusat satuan di 144 kawasan pengembangan yang merupakan pusat pengelolaan hasil pertanian, perikanan, dan mendukung sasaran kemandirian nasional.

Targetnya sudah tercapai 153 kawasan, mudah-mudahan bisa.... Kemudian berkembangnya 20 kawasan perkotaan baru menjadi perkotaan kecil dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dari target 20 kawasan, kita sudah tercapai 18, mudah-mudahan bisa kurang dua ini bisa tercapai di tahun anggaran 2019 yang akan datang.

Bapak Ibu sekalian, pimpinan yang saya hormati.

Seperti tadi dikemukakan oleh pak Sigit bahwa pagu anggaran kita pada tanggal 16 April 2018 yang telah kami sampaikan adalah Rp.4.555.623.104.000, tetapi pagu indikasinya ada perubahan karena adanya dana yang harus ditarik dari kementerian Keuangan untuk penekanan di bidang pembangunan SDM, jadi kita dikurangi sebesar 220 milyar sehingga pagu indikasinya menjadi Rp.4.325.623.104.000.

Adapun rincian dari pagu anggarannya adalah atau pagu indikasi yang kami usulkan, yaitu di dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dari kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, dari pagu indikatif Rp.257.439.343.000, menjadi pagu anggarannya Rp.254.439.343.000, untuk pengawasan dan peningkatan pagu akuntabilitas aparatur kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan

transmigrasi, dari Rp.57.047.436.000 menjadi Rp.57.047.436.000, sedangkan untuk penelitian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan serta informasi tetap, yaitu Rp.230.020.013.000, untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dari Rp.2.269.511.550.000, terjadi pengurangan sebesar Rp.94.377.772.000 hingga menjadi Rp.2.175.133.778.000.

Untuk pembangunan kawasan pedesaan, dari Rp.336.595.477.000, menjadi Rp. 315.277.856.000 atau terjadi penurunan Rp.21.317.621.000. untuk pengembangan daerah tertentu dari Rp.229.427.822.000, menjadi Rp.215.470.572.000 atau terjadi penurunan Rp.13.957.250.000, untuk pembangunan daerah tertinggal dari Rp.319.253.367.000 menjadi Rp.280.858.139.000 atau terjadi penurunan Rp.38.395.228.000.

Sedangkan untuk penyiapan kawasan dan pembangunan pemukiman transmigrasi dari Rp.440.104.324.000 menjadi Rp.390.118.518.000 atau terjadi penurunan sebesar 19.985.806.000 untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dari Rp.432.223.772.000 menjadi Rp.403.257.449.000 atau terjadi penurunan Rp.28.966.323.000, sehingga totalnya dari Rp.404.545.623.140.000 menjadi Rp.4.325.623.104.000 atau terjadi penurunan Rp.220 milyar.

Sedangkan komposisi pagu anggaran di tahun 2019 bapak-bapak bisa lihat semua ditabel ini, bahwa sebagian besar dipakai untuk belanja barang yaitu sebesar 3,78 triliun atau 87,41% dari total pagu anggaran ditahun 2019, sedangkan sisanya untuk belanja modal, ini sebetulnya belanja modal ini hanya masalah lajer saja, karena di kementerian Keuangan untuk transmigrasi, belanja barang itu masuk di lejer belanja modal, sedangkan untuk direktorat jendralnya masuk di belanja modal, sebetulnya ini bisa jadi satu, tetapi lejernya di kementerian Keuangan begitu, itu ada 3,52% sedangkan belanja pegawai itu 239,28 milyar atau 5,46% sedangkan belanja barang operasional itu 156 milyar koma 06 atau 3,61%.

Sedangkan pagi anggaran tersebut didanai dari rupiah murni sebesar 4,3 triliun atau 99,54% dan pinjaman luar negeri sebesar 20 milyar atau 0,46%. Sesuai dengan permintaan dari pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI yang terhormat pada pertemuan sebelumnya kita buat skala prioritas dan kita bagi menurut direktorat jendreal, skala prioritas kegiatan untuk pada tahun anggaran 2019 yaitu yang pertama adalah dukungan manajemen tugas teknis serta pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur, yaitu pelayanan perencanaan, layanan hubungan masyarakat dan informasi publik, layanan hukum dan organisasi, layanan bidan SDM dan umum, pelaksanaan anggaran dan penatausahaan BUMN, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur sedangkan untuk (rekaman tidak jelas) pendidikan dan informasi yaitu Diklat ASN pelatihan masyarakat, pemberdayaan di 8 balai mencakup 16.388 orang, penyajian data informasi tentang desa daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Kegiatan prioritas pada tahun anggaran 2019 itu di Direktorat Jenderal, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pertama adalah bantuan pengembangan usaha Bumdes, ada tadinya 1000 unit, karena ada pengurangan anggaran dipotong menjadi 800 unit, oke saya barusan diinform

oleh Dirjen PPMD bahwa dengan adanya efisiensi kita bisa tingkatkan lagi buka 800 tetapi 1200 unit, untuk bantuan Bumdes, kemudian jadi diralat bukan 800 tetapi menjadi 1200 unit, kemudian untuk pendamping desa 40.341 orang, kemudian untuk pengembangan ekonomi desa itu ada 100 desa, pembangunan embung desa ada 90 desa, kemudian pembangunan dan pengelolaan Sumber Daya Air, berbasis (rekaman tidak jelas) itu ada 20 desa, bantuan pengembangan rehabilitasi satpras destinasi wisata itu ada 30 desa, itu detailnya juga sudah kita bandingkan pak lokasi-lokasinya itu ada lampiran Bapak Ibu bisa melihat di billnya satu-persatu didalam buku seperti ini yang kita sudah bagikan keseluruh anggota, jadi bapak-bapak bisa melihat lokasi-lokasinya di daerah mana saja, dan nanti mohon masukannya apakah sudah sesuai atau belum, atau ada masukan yang perlu diafirmasi di daerah Dapil bapak-bapak.

Kemudian untuk pembangunan kawasan pedesaan itu pengembangan sarana dan prasarana Bumdes bersama itu ada 65 unit kemudian pengembangan pasar antar desa atau kawasan pedesaan ada 15 unit, pembangunan sarana dan prasarana air bersih ada 40 unit, pengembangan embung, bangunan penampung air ada 68 unit, pengembangan kawasan pedesaan, pendampingan kawasan pedesaan itu ada 160 orang, kemudian bantuan sarana dan prasarana pengelolaan hasil paska panen produksi pertanian itu ada 21 KP sedangkan poros jalan antar desa ada 41 Kilometer, lokusnya ada disini semua, mohon diperiksa apakah 41 atau 14, sorry 14 pak, terima kasih koreksinya.

Kemudian pengembangan daerah tertentu, penyediaan sarana dan prasarana paska panen itu ada 21 kabupaten, sarana air bersih ada 12 kabupaten, bantuan pembangunan embung dan bangunan air lainnya itu ada (rekaman tidak jelas), pembangunan udang pangan lokal dan lantai jemur 15 kabupaten. Peningkatan jalan non status itu 11 kabupaten.

Peningkatan kapasitas tenaga kerja di daerah tertinggal itu ada 1278 orang, pembangunan asrama siswa guru daerah terpencil ada 4 unit, pembangunan ruang kelas baru di daerah terpencil ada 60 unit, dukungan pengembangan pilkades ada 44 kabupaten.

Pembangunan pasar kecamatan untuk .. ada 8 unit (rekaman tidak jelas)....

Kemudian penataan persebaran penduduk itu untuk 1383 KK, pembangunan RPJK dan SAB itu 1055 unit, pembangunan peningkatan fasilitas umum itu ada 264 unit, pembangunan dan peningkatan atau rehab jalan di kawasan transmigrasi yang dari kita ada 162,48 km, itu juga sudah bekerja sama, melobby Kementerian PU untuk memberikan aformasi di daerah transmigrasi, mohon dukungannya dari Komisi V DPR RI juga pak, karena itu akan meningkatkan ekonomi, (rekaman tidak jelas) kalau jalan-jalan kabupaten dan provinsinya rata-rata bermasalah.

Pembangunan atau peningkatan rehab jalan kawasan jembatan di kawasan transmigrasi ada 545m, fasilitas sertifikasi tanah transmigrasi untuk 1000 bidang, ukur bagi lahan itu ada 16.397 bidang, satu pangan untuk

2510 kepala keluarga, pembangunan dan peningkatan bandung atau embung itu 12 unit.

Demikian yang kami dapat sampaikan pak selanjutnya mohon arahan atau masukan dari bapak-bapak Komisi V DPR RI yang kami hormati, demikian *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.

KETUA RAPAT:

Terima kasih pak Menteri Desa PDT dan daerah tertinggal atas penjelasannya, kita ... waktu yang tidak terlalu lama, mudah-mudahan waktu yang tidak terlalu lama ini bisa menghasilkan kesepakatan kuat diantara anggota Komisi V DPR RI dan Kementerian PDT dan jajarannya, saya lihat pak Erani sudah tidak ada ya mungkin bisa diperkenalkan pak Menteri penggantinya, biar semakin hapal.

.....:

Terima kasih pimpinan, ... diminta oleh Presiden untuk menjadi salah satu staf khusus Presiden, kemudian kalau boleh saya kenalkan satu persatu itu pak Nurdin, itu Direktur Jenderal PK Trans, kemudian disebelah saja pak Sekjen pak Anwar Sanusi, pak Taufik Majid, kemudian Pak Dodo, pak Syamsul Dodo, itu Direktur Jenderal pembangunan desa daerah tertinggal, kemudian di PKP 2 Trans ini baru beberapa bulan, itu pak Hari, kemudian untuk Dirjen PKP, karena pak Hairani diambil kita baru menunjuk PLT, baru memproses Pansel dan PPPA itu ibu Lina, kemudian PDTU karena pak Max pensiun kita juga sedang mengajukan ke TPA PLTnya sekarang ibu Aisyah, kemudian Kepala Bali ... kita juga dalam proses PPPA, itu dirangkap oleh Sekjen.

(rekaman tidak jelas)

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasannya, dimeja pimpinan sudah ada 20 anggota, yang ingin bertanya, kita perlu sepakati dulu, kira-kira kita akan rapat sampai jam berapa, sampai jam 5 saya kira ya, waktu bicara 3 menit, kali 20 sudah 1 jam. Saya kira jangan lama-lama ya menit kalau bisa maksimal ya, bahan-bahan dan serta alokasi sudah ada didepan bapak-bapak ini langsung saja to the point saya kira dan pak Menteri tadi sudah saya sampaikan sebagian diantara dana Bumdes itu belum cair, sementara kita sudah membahas APBN 2019, itu padahal kegiatan dan program 2018, mohon ditanggapi sambil menjawab pertanyaan dari teman-teman bisa dijelaskan juga.

Yang pertama ini sudah sesuai dengan urutan ya, yang pertama pak Sungkono dari Fraksi PAN, daerah pemilihan Surabaya Sidoarjo, siap-siap pak Suhartono dari Fraksi Nasdem daerah pemilihan Jawa Timur 8, siap-siap pak Muhidin itu 3 penanya yang pertama, silakan pak.

F-P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Terima kasih pimpinan.
Yang kami hormati pak Menteri dan jajarannya.

Pertama kita melihat rencana (rekaman tidak jelas) pak, kami menyampaikan di Jawa Timur saja dulu, itu ada satu daerah yang menurut saya cukup (rekaman tidak jelas), tidak ada dukungan tidak bisa dilaksanakan sangat sulit, kami dapat data itu sudah dari apa Pemerintah daerah itu, tetapi karena tidak ada direncana yang bapak siapkan ini, akhirnya (rekaman tidak jelas), saya khawatir daerah-daerah yang sudah jadi renstra bapak ini belum tentu prioritas itu, karena ternyata ada juga daerah seperti itu.

Kira-kira masih mungkinkah kami mengaspirasi supaya kita sebagai mitra benar-benar ada manfaatnya, bukan ini barangkali ini untuk kepentingan publik juga ya, kalau dikunci seperti ini pak, rasanya tidak bisa kita bicara aspirasi, langsung saja pada posisi... (rekaman tidak jelas), rasanya ini yang perlu bisa saya sampaikan, mudah-mudahan aspirasi ini bisa diubah atau bisa diprioritaskan, betul-betul itu daerah (rekaman tidak jelas) saya rasa kami tidak bisa melihat ada aturan atau tidak, ada kemungkinan karena kami di Komisi V DPR RI ini Fraksi PAN, sebagian daripada kewajiban daripada kami untuk menampung aspirasi Fraksi secara umum, kadang-kadang juga diminta anggota kami di daerah lain, harus menyampaikan ke kami kalau bicara pendidikan, seakan-akan berkaitan dengan pendidikan, jadi rasanya juga apa yang kami sampaikan juga ada korelasinya daripada tugas DPR itu ya, menyampaikan aspirasi, terus ini yang kedua, dalam bantuan-bantuan yang bapak lakukan seperti bantuan apa, permodalan usaha yang angkanya rata 250 juta, ini ukurannya apa, memang harus disamakan semua atau memang kondisi keuangan yang harus segitu, saya khawatir kok semua harus dibagi rata, sepertinya begitu, padahal satu daerah persoalan berbeda-beda begitu, kalau MKI nya besar barangkali juga perlu dukungan yang patut begitu.

Saya rasa jujur saja kami melihat pak ya, di Sidoarjo itu ada kas nasional yang sampai hari ini belum selesai disitulah akibat daripada bencana lumpur itu banyak UMKM kita yang jatuh pak, kalau dulu karyawannya terlibat disana 4000 sampai 5000 orang, sekarang itu sudah lebih dari 500, jadi ada satu persoalan sosial yang sebetulnya itu mengganggu, tetapi inikan tidak nampak pak, karena mereka melakukan pola yang dulu sebagai pengerajin laris sebagai buruh, kadang-kadang kemana itukan karena tidak mampu menghidupi dirinya disitu, kami ingin kemarin juga mengusulkan apa untuk program daerah wisata kami, karena beda antara kementerian yang satu membahas infrastruktur yang kami berupaya membangun kemitraan didalam para pengerajin itu supaya mereka bisa kembali lagi kedesaanya, untuk bekerja seperti dulu karena sekarang Pemerintah membangun infrastruktur mereka juga jatuh pak, kalau pohon itu sudah berhenti dari bawah lagi, kan ditebang itu pak.

Pengerajin yang bagus karena ada ekonomi yang sulit itu, mereka harusnya bangkit lagi, dan ini harus mendapat dukungan, meskipun mereka hidup tetapi isinya tidak hidup. Ini mohon karena tidak masuk di prioritas-prioritas seperti ini, saya mohon aspiratif, hal ini bisa ditampung kami memenuhi syarat apanya, syarat yang harus kita penuhi, karena selama ini kami tidak bisa apa saya mengakses itu, karena waktu TA saya menghadap

ke bagian yang berkaitan dengan itu rasanya sulit, karena tidak ada lagi (rekaman tidak jelas) barangkali ini pak, kami berupaya fungsi kami apa gunanya kami ... sama sekali kami tidak mampu memberikan yang terbaik untuk anggota-anggota, terima kasih, *Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih pak Sungkono, selanjutnya pak Suhartono, siap-siap pak Muhidin.

F-PG (H. MUHIDIN MOHAMAD SAID, S.E., M.B.A):

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Yang saya hormati bapak ketua dan wakil ketua Komisi V DPR RI.

Yang saya hormati anggota Komisi V DPR RI.

Dan yang saya hormati pak Menteri Desa berikut jajarannya.

Kami tidak lama memimpikan agar Bumdes ini kuat, karena Bumdes tersebut menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi di sebuah desa itu, saya pernah berpengalaman tahun 80 an, saya buat satu distributor 9 bahan pokok, itupun ditingkat kecamatan kita adakan sub seperti itu, kaitanya dengan sekarang bumdes ini kan sedang bergerak, sekarang ini desa ini uangnya banyak, sekarang ini desa itu bingung juga, karena belum ada panduan mungkin juknis, tentang apa yang harus dilakukan di Bumdes itu, saya mengusulkan agar fokus saja pada 9 bahan pokok pasar, kebutuhan rakyat, dan itu pak, itu sebuah rangkaian usaha dari pabrik sampai ke konsumen, sekarang ini rakyat untuk mendapatkan mie instant saja itu sudah melalui paling tidak 5 penyalur, 5 distributor, tetapi kalau Bumdes ini, kemudian di tingkat kabupaten ada yang namanya distributor begitu, mungkin itu tugas Agar teknisnya bagaimana pak Menteri agar mengadakan satu sistem terintegrasi seperti itu.

Tugasnya pak Menteri dan jajarannya tentu menjadi media untuk bisa mendekatkan distributor dan sub agen atau distributor ditingkat kabupaten, katakan ini katakan minyak dan segala macam, sehingga harga itu jelas murah, kalau ada 4 distribusi yang terpotong sejak itu, sudah sangat luar biasa, ini termasuk impian pak, karena juga lain dan disebelah desa, dan desa ini bukan hal yang sepele saat ini pak, jadi kemungkinan dengan adanya dana yang melimpah ruah seperti sekarang ini bisa saja nanti desa itu merupakan satu kegiatan ekonomi dasar, yang ingin memperkuat materi ini, karena apa yang ingin kita ketahui (rekaman tidak jelas), apalah kebutuhan bahan dasar rakyat didesa itu tidak terpengaruh oleh dolar, lepas dari itu pak, oleh karena itu sistem itu harus segera diberdayakan pak, kemudian yang

kedua, sebenarnya Bumdes ini tulang punggung dari program terdahulu yang belum di lucurkan oleh Gubernur Jawa Timur, saya pikir pak Sekjen sudah ada kata-kata one (rekaman tidak jelas).

Saya kira kalau (rekaman tidak jelas) terlalu kecil, bagaimana dalam satu kawasan sebuah kabupaten itu ada satu dua (rekaman tidak jelas) itu sudah sangat bagus pak, karean apa unggulan itu pasti bersifat khusus, unggulan disatu daerah tidak mungkin didaerah yang lain, kemudian yang ketiga, saya berharap desa atau pak Menteri Desa ini tidak menganggarkan saluran air yang bersifat sekunder, primer, embung dan sebagainya, karean itu sebenarnya diwilayah Sumber Daya Air, dan saya dengar Sumber Daya Air kan membuat lagi atau menghidupkan lagi peremajaan atau perbaikan saluran primer diseluruh negeri, karena sudah waktunya pak, jadi yang namanya primer sekunder ini dibangun kalau di Jawa itu jaman tahun 80 an, saatnya sudah ada recovery lagi kelihatannya akan dianggarkan seperti yang lalu-lalu ada irigasi Jawa Tengah, irigasi Jawa Timur, irigasi macam-macam.

Kemudian yang terakhir pak, termasuk kegiatan yang menyangkut Dapil saya, Dapil 8 Jatim itu ada 2 anggota Komisi V DPR RI, yang mengusulkan disini ini, kelihatannya disitu itu baru usulannya ... usulan saya kok ngak ada, apa kira-kira telingsut, ini bukan (rekaman tidak jelas) pak, tetapi kenyataannya memang 2 anggota Komisi V DPR RI, yang Dapilnya sama, jadi nanti saya akan ke pak Taufik terutama mengusulkan yang Bumdes pak, saya sangat antusias untuk Bumdes, dan nanti saya siap menjadi pendamping pak disana, saya kira demikian, terima kasih, *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

(rekaman tidak jelas), baik silakan pak Muhidin, siap-siap pak Rendy ya.

F-PG (MUHIDIN M. SAID):

Terima kasih pimpinan.

Pak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati.

Rekan-rekan sekalian.

Jadi saya kira kalau hari ini pak Menteri didalam sambutannya sudah menyatakan bahwa buku ini kami sudah menerima pak, dan dibuku ini sudah bisa kelihatan, tentu kalau saya nanti pada saat rapat Eselon I (rekaman tidak jelas), terima kasih banyak pak Menteri.

Pak Menteri yagn saya hormati, saya menarik pak, pada saat kemarin pidato Menteri Keuangan, menyampaikan jawaban Pemerintah atas pandangan Fraksi-Fraksi dalam RAPBN tahun 2019, menyangkut masalah pengawasan dana desa, jadi didalam pidato ibu Menteri itu, ini saya cuma

kawatir Kepala Desa ini tidak bisa kerja lagi pak, ini barangkali pak Menteri bisa melakukan apa namanya, melakukan cross check lagi atau melakukan evaluasi, kira-kira bagaimana, supaya pengawasa ini terarah, efektif dan desa itu tidak menjadi sandera pak, ini perlu diperhatikan, kalau disini pak, ini ada 7 point, menyangkut pengawasan dana desa ini, saya jadi bingung pak, ini pidato Menteri Keuangan pak, disamping pemberdayaan aparat pendamping desa, kitakan mau bagaimana desa itu bisa memanfaatkan dana ini lebih efektif dan efisien dan punya akuntabilitas yang bagus, tetapi tentu pengawasan ini juga jangan menjadi hambatan, orang desa sudah tahu bahwa perangkat desa itu, dari sisi SDM sangat lemah, tetapi kalau diberikan terllau banyak begini pengawasan, bisa-bisa saya kawatir tidak bisa kerja pak.

Ini barangkali pak Menteri saya hanya menyoroti ini supaya bapak betul-betul, desa ini bisa kita harapan-harapan dari pada Pemerintah dan bapak sekalian, dan ktia semua ini supaya desa ini bisa berkembang bisa tumbuh, bisa lebih baik lagi kedepan, supaya dana desa ini bisa lebih efektif.

Sedangkan diawasi saja sedikit sudah bingung apalagi kalau banyak polisi ikut, BPKP ikut, BPK ikut, Bupati ikut, Camatnya ikut, Direkturnya ikut bagaimana nanti, kejaksaan juga ikut, ini ada pak.

Saya kawatir nanti bapak punya harapan dalam rangka pemberdayaan desa ini tidak tercapai dan saya ini masih banyak desa pak, yang harus kita benahi, oleh karena itu saya minta pak Menteri benar-benar bisa melakukan efektifitas, karena aparat-aparat kita, tujuan kita bagus pak, tetapi kalau sudah sampai dibawah (rekaman tidak jelas) pak, sama dengan masalah konstuksi, pembangunan proyek, itu kejadian didaerah itu kasihan pak, dia disanderalah Bupatianya inilah lain-lain, karena disitu juga sudah ada kerjasama, jadi mereka itu setiap saat rapat dan rapat, kadang susah lupa segalanya ini saya takut, jangan sampai tujuannya bagus, tetapi biaya untuk rapat saja habis, ini bisa berbahaya juga, inilah pak Menteri jadi saya hanya menyoroti ini, kalau ada ini saya kira sudah cukup bagus tadi pak Menteri sudah membuka ruang, nanti pada saat pembahasan Eselon I kita lebih fokus dalam rangka melaksanakan tahun 2019 ini APBN kita lebih akuntabilitas, saya kira begitu pak Menteri terima kasih.

KETUA RAPAT:

Lanjut pak Rendy, siap-siap pak Abu Bakar.

F-PDIP (RENDY LAMADJIDO):

Terima kasih pimpinan.

Yang saya hormati pak Menteri dan seluruh jajarannya.

Teman-teman Komisi V DPR RI yang kami cintai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Menteri saya hanya melihat dari (rekaman tidak jelas) tadi pak .. sudah menjelaskan dari segi penguasaannya, kalau saya dari segi aspek pelaksanaan pak Menteri, memang saya melihat bahwa memang apa yang dibutuhkan bersama-sama, semangat kita dulu bagaimana kementerian ini mampu membangun dalam sistem Pemerintah Jokowi yang disebut membangun dari pinggiran ini bisa tercapai, yang tentunya adalah, yang pertama adalah benar-benar apa yang (rekaman tidak jelas), mungkin saya lihat yang menjadi target kita untuk melaksanakan pelaksanaan dalam program-program dana yang masuk desa ini, yang tentunya saya tidak mempersalahkan juga teman-teman (rekaman tidak jelas) yang tentunya kita sama-sama melakukan persamaan persepsi dalam membangun satu desa itu, karena kalau tidak pak, itu akan dipergunakan oleh oknum dalam mencapai politik tertentu, ini yang tidak bagus dalam persoalan ini, saya harapkan ini jangan sampai terjadi, saya berharap banyak juga dari oknum-oknum dalam Pemerintahan bapak itu tidak membawa-bawa persoalan ini menjadi persoalan politik.

Saya sendiri sebagai orang Politik yang membawa anggaran tidak pernah (rekaman tidak jelas) sebagai aturan politik saya, karena ini benar-benar untuk menyentuh masyarakat desa, saya kira ini profesionalnya kita perlu benahi bersama-sama, tentunya kita punya persepsi yang sama, apa yang harus dibangun didesa ini, jangan hanya persoalan politik kita memberikan anggaran, tetapi tidak tahu apa yang dibangun, tentunya juga pendamping desa ini memahami tugas dan fungsinya.

Jangan karena beliau-beliau ini sudah masuk katagori orang-orang tertentu, tinggal minta saja, ini juga tidak bagus pak Menteri, itu yang pertama, yang kedua adalah masalah saya senang sekali ada program disini yang namanya program paket... yang tentunya saya berharap tentunya akan diperbanyak, karena banyak desa-desa yang kemampuan sumber daya manusianya sudah bagus, tetapi membutuhkan ini, didaerah saya itu banyak sekali terutama didaerah transmigrasi pak Menteri, daerah transmigrasi inikan orangnya Sumber Daya Air nya sudah agak lebih maju, karena mereka tinggal di Bali ada disana, dan mereka hanya memasang sudah lebih maju, membutuhkan ini, ada beberapa desa yang saya lihat bumdesnya bagus, tinggal mereka mempromosikan daripada ini, ada beberapa desa ini, jadi bumdesnya sudah jalan bagus, ada mungkin sudah melahirkan satu usaha-usaha ekonomi kreatif, ada yang namanya tenunan, itu alat tenunan Batik, ini membutuhkan satu perangkat yang ini juga saya melihat bahwa penempatan ini kadang tidak pas, tolongkan bukan saya (rekaman tidak jelas), tolonglah kami ini diberitahu dulu, kami turun kebawah pak Menteri, kami tahu benar mana desa-desa yang memerlukan, terus terang saja dibeberapa tempat itu ada yang salah, harusnya desa itu belum dapat itu dia hanya dapat pengembangan Sumber Daya Air nya dulu, ketimbang daripada (rekaman tidak jelas), saya kira ini pak Menteri.

Yang paling terakhir saya berharap juga didaerah saya itu, ini Dapil, daerah saya itu kan daerah kurang lebih 60% transmigrasi, boleh dikata bahwa daerah transmigrasi yang termaju di Indonesia ini ada 3 lokasi, yaitu daerah transmigrasi lokasi (rekaman tidak jelas) yaitu menjadi cikal bakal

kabupaten, terus cikal bakal terus daerah transmigrasi kota Raya, dan termasuk transmigrasi.... Ini ketiga transmigrasi kita bisa mendongkrak buat pendapatan belanja daerah ini, saya lihat mana yang namanya desa mandiri, saya dengan pak Muhidin bertanya-tanya, ini transmigrasi ini, kita kalau turun (rekaman tidak jelas), ditanya mana program desa mandiri ini, inikan kami menunggu ini, terus terang saja saya konsultasi terus, kebetulan pak Muhidin dan ketua saya tanya, mana ini program desa mandiri, sebab teman-teman dibawah ini sudah tanya kita punya desa kita maju tetapi tidak jelas yang mana, ini juga pak Menteri saya berharap harus ada kejelasan dikit-dikit, menjadi kota kecil yang bagus, saya kira memang di Sulawesi Tengah ini dikenal dengan transmigrasi yang sangat maju, itu saja pak Ketua, Wabillahitaufik Walhidayah.

Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatulahi wabarakatuh.

Pak Rendy, lanjut pak Abu Bakar, siap-siap (rekaman tidak jelas), dan pak Nurhasan.

F-PPP (Drs. H. ABUBAKAR WASAHUA, SH, MH.):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Bapak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati.

Pimpinan dan segenap anggota DPR Komisi V DPR RI yang saya banggakan.

Yang pertama saya ingin menyampaikan berkaitan dengan penjelasan bapak Menteri, tadi penjelasan pak Menteri bahwa telah terjadi penurunan pagu dari segala dari seluruh program yang dicanangkan, kira-kira seperti itu pak Menteri ya, saya ingin bertanya, kenapa harus terjadi penurunan Pagu seperti ini, ini apakah berkaitan dengan penurunan kinerja kementerian, ataukah ada pertimbangan lain, logika sehat menyebut bahwa ketika kinerja kementerian bagus maka tidak akan terjadi penurunan pagu seperti itu, apalagi penurunan pagu ini merata, mungkin pak Menteri bisa menjelaskan itu, indikator apa penyebab penurunan pagu yang dimaksud.

Kemudian yang kedua, saya masih berkeinginan untuk berbicara tentang pinjaman luar negeri, yang jumlahnya 20 milyar, terlalu sedikit, sangat sedikit, kalau kita meminjam itu tanggung, kalau 20 milyar saja itu melecehkan kementerian, tetapi ini sudah terjadi seperti yang dijelaskan kementerian, kira-kira seperti apa 20 milyar ini diberdayakan, untuk

kepentingan program kementerian, ini harus jelas, sebab saya melihat dari tadi, ada unit kerja itu juga terlibat dalam proses utang luar negeri itu, ini perlu kita mendapat penjelasan yang tepat, sehingga kita bisa memberikan jawaban bahwa rata-rata kementerian itu melakukan peminjaman luar negeri, meskipun angkanya tidak persis sama, yang ketiga, program yang tercantum dalam lembaran buku ini, buku tidur ya istilahnya, ini kelihatannya tidak terlalu sesuai dengan harapan.

Oleh karena itu barangkali dalam pembahasan selanjutnya program-program yang ditetapkan ini bisa ditinjau kembali, tentunya sesuai dengan pendekatan anggaran yang telah dimiliki oleh kementerian itu sendiri, lalu saya berharap agar program yang dicantumkan ini hendaknya di arahkan, secara merata keseluruh Dapil, dan Dapil yang saya maksudkan disini adalah Dapilnya anggota Komisi V DPR RI.

Diarahkan secara merata meskipun harus dengan menggunakan pendekatan proporsional, dan jelas jangan ada wilayah Dapil anggota yang berbeda. Lanjut, berkaitan dengan bantuan desa, tadi sudah di (rekaman tidak jelas) bahwa dana desa itu perlu pengawasan ketat, dana desa yang didistribusikan itu harus mendapatkan pengawalan yang luar biasa, kenapa karena dilapangan kita sering menemukan dan mendapatkan adanya desa yang salah dalam penggunaan bantuan desa itu, dana yang didistribusi digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan konsumsi, tidak berkaitan dengan pemberdayaan desa, pembangunan desa, yang dimaksud bahkan temuan kita dilapangan, ada kepala desa yang menggunakan dana desa untuk membeli kacamata yang harganya Rp.10.000.000, pembelian kacamata dengan harga Rp.10.000.000 diambil dari dana desa pak, ini artinya sudah terjadi penyimpangan yang luar biasa, oleh karena itu kepada pak Menteri saya berharap mudah-mudahan kebijakannya kedepan itu semakin menutup ruang bagi kepala desa, untuk memainkan anggaran ini dalam rangka memenuhi kepentingan, ini harus ketat pak Menteri, mungkin selama ini petunjuk pelaksanaan penggunaan dana desa itu masih terkesan longgar pak Menteri, sehingga ada ruang tertentu yang bisa dimanfaatkan oleh sebagian Kepala desa yang nakal dalam tanda kutib untuk melencengkan tupoksi dari bantuan desa yang pak Menteri butuhkan, saya kira ini untuk sementara, terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan pak Bakri, siap-siap pak Anwar dan pak Anton.

F-PAN (H. A. BAKRI H.M., S.E.):

Terima kasih pimpinan yang saya banggakan.

Pak Menteri dari Fraksi PAN.

Yang saya hormati pak Sekjen beserta jajaran yang saya hormati.

Tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman terdahulu, saya mungkin menegaskan saja beberapa point, pertama yang disampaikan oleh pak (rekaman tidak jelas) itu adanya aturan daripada pengawasan yang begitu banyak macam pak. Yang ini kadang-kadang membuat kawan-kawan atau saudara kita yang kebingungan dibawah karena tidak setiap saat kadang-kadang mereka dipanggil, sehingga mereka susah bekerja, ini perlu dievaluasi, apalagi menyangkut tahun Pemilu sekarang ini, takut ada disalahgunakan oleh orang-orang tertentu saya langsung saja pak Menteri, terima kasih tadi sudah dipaparkan pak Menteri dan saya sudah baca, dibukunya disini sudah terbagi habis, cuma mungkin ada satu point yang saya titip, Bumdes saya belum mengajukan, di 10 lokasi didaerah Muara Jambi, nanti mungkin diusulkan pak Menteri.

Yang kedua, saya usulkan juga pak Menteri saya menyampaikan terima kasih kepada jajarannya pak Sekjen, pak Dirjen ini pak Mukhlis selalu aktif menyampaikan informasi kesaya dan selalu menjembatani pertemuan-pertemuan dengan beberapa teman-teman pendamping.

Lebih kurang kira-kira 2 minggu yang lalu saya menghadiri acara di Jambi yaitu hampir 300 pendamping lokal desa, yaitu acara peningkatan kapasitas, dan acara ini cukup bagus, sepertinya mereka ingin kegiatan-kegiatan ini betul selalu ditingkatkan, tetap lebih fokus, jangan setiap pertemuan sekali membahas keseluruhan sehingga mereka tidak fokus, sehingga waktunya sangatlah mepet, kadang-kadang pertemuan paling 2 jam dengan BPKP, dengan kepolisian satu jam apa tidak maksimal, jadi mungkin dibikin rayon, yang dihadirkan itu masing-masing diwilayah itu sehingga mereka betul-betul terasa manfaat daripada peningkatan kapasitas itu, ada hal yang saya harapkan disitu pak Menteri dengan gaji mereka itu, mereka merasa seperti belum maksimal, karena gaji itu mereka terima sudah termasuk fasilitas, saya dengar disitu sudah termasuk kertas, termasuk macam-macam, kelengkapan alat tulis dan semua-semua laporan-laporan semua disitu, jadi ini mungkin perlu ditinjau kembali.

Yang kedua adanya wilayah yang berbeda yang dipukul rata, ini sepertinya dulu itu pernah kita mau tinjau kembali, ada pembagian mungkin alokasi daerah-daerah khusus yang memang perlu ada perhatian khusus terhadap ini, karena mereka dipukul rata pak Menteri, sudah itu (rekaman tidak jelas) komputer mereka bawa sendiri kalau tidak rusak, kalau rusak sudah habis gaji satu bulan katanya begitu.

Kedua mereka menyampaika kesaya teman-teman PDIP itu kalau bisa kontrak mereka ini jangan cuma setahun, tetapi ditingkatkan, sehingga mereka juga kerja bisa maksimal, ini seperti kata gaji pegawai itu senin kamis, belum sampai sebulan mereka sudah dagdigdug, ini masih dipakai atau tidak, kecuali mungkin kalau ada pendamping yang memang tidak bisa kerja maksimal ya sudah, kalau perlu belum setahun sudah diganti, tetapi kalau memang yang bagus itu saya pikir perlu, sama dengan kegiatan-kegiatan di PUPR itu mereka berlanjut, ini supaya mereka punya rasa keyakinan sehingga kerja mereka juga bisa maksimal.

Yang kedua dalam hal pencairan berita acara, ini mereka kadang mengawasi pekerjaan, tetapi pada saat pencairan, pada saat mereka memberikan satu perhatian atau mereka, disitu mereka tidak dilibatkan, kalau salah pendamping yang disalahkan, tidak salah kalau mereka ikut menandatangani berita acara, karena mereka yang mengawasi pak, mereka yang mengawasi. Hal-hal ini mungkin yang apa yang perlu menjadi perhatian.

Mereka berharap sekali, saya bilang pada saat itu saya kebetulan WA langsung dengan pak Mukhlis, kebetulan sinyalnya kurang pak waktu itu sehingga tidak bisa, tetapi mereka sangat mengharapkan bisa disampaikan pada pak Menteri, alhamdulillah bisa menyampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian dari Kementerian Desa Tertinggal.

Dan yang terakhir adalah saya sampaikan lagi, bahwa aturan yang banyaknya terlibat dari pengawasan ini saya pikir bukan membuat penyaluran desa itu bisa efisiensi, tetapi membuat rumit pak, sehingga bisa ditinjau kembali, sehingga betul-betul dana desa ini efisiensi dan bisa sampai ke masyarakat.

Itu mungkin pak Menteri, sama dengan pimpinan tadi dana Bumdes pak kalau bisa cepat digulirkan karena itu yang menjadi bintang sekarang, saya yakin semuanya teman-teman mengusulkan semua, terima kasih pak Ketua pak Menteri, *Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh*.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatulahi wabarakatuh.

Selanjutnya pak Nurhasan Zaidi.

F-PKS (NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I):

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Saudara Menteri serta jajarannya.

Pimpinan Komisi, serta rekan-rekan yang saya hormati.

Saya to the point saja apa yang disampaikan diuraikan oleh teman-teman sudah cukup banyak, point penting pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Desa aspirasi dari daerah pemilihan sudah mulai terealisasi, mudah-mudahan amal kebaikan buat kita semua, khususnya Kementerian Desa. Tetapi tentunya untuk daerah pemilihan kami yang saya melihat sepertinya beban tugas Kementerian Desa ini luar biasa, dengan percepatan pembangunan Pemerintah, tetapi kondisi desa kita secara umum masih sangat prihatin, jadi tugas-tugas besar kementerian yang dana yang masih terbatas terus malah mengurang dari dana 2018 dan 2019 ini karena efisiensi atau karena daya serap yang sudah maksimal, memang kita tahu keterbatasan Pemerintah dengan kondisi ekonomi yang makin prihatin, tetapi

tentunya yang penting adalah tugas Kementerian Desa secara umum saya menilai cukup kebawah, tinggal kuantitasnya diperbesar, secara kualitas oke, secara program, saya hanya mengusulkan 2 poin penting, khususnya di daerah pemilihan saya, tentunya secara umum Dapil di Komisi V DPR RI saya lihat merespon cukup baik, tetapi tentunya secara umum dapil-dapil di Komisi V DPR RI saya lihat merespon cukup baik, tetapi tentunya daerah pemilihan kami walaupun saya kalau melihat kondisi desa diluar Jawa juga lebih prihatin, jadi kalau saya meminta tolong untuk desa di Jawa khususnya Jawa barat, saya malu hati kadang-kadang, lebih prihatin kondisi diluar tetapi dengan melihat di daerah pemilihan saya ini ada sebuah proyek nasional yang namanya Bandara Kertajati, bandara internasional Jawa Barat yang terbesar kedua di Jawa Barat, bahkan lahannya jauh lebih besar ribuan hektar daripada Soekarno Hatta, jadi kedepan ini akan menjadi sebuah ledakan daerah yang modern karena bandara itu akan melahirkan sebuah kota.

Logika sekarang ini bukan kota melahirkan bandara, tetapi bandara yang hadir di sebuah lahan desa, ini kan desa yang tidak terprediksi akan ada bandara, saya tahun 80 sampai 90 Kertajati itu pak dari Jakarta 12 jam pak, jadi kalau dari sini habis sarapan pagi jam 7 sampai Kertajati itu menjelang Magrib atau Isya, saking itu tempat atau desa tidak terprediksi akan ada bandara itulah kemajuan modern ada sebuah lompatan kembali lagi persoalan bandara Kertajati, ini lucu juga Kertajati ini, kita sudah sampaikan ke PU kemarin sudah ada percepatan peresmian dari Presiden, alhamdulillah cepat selesai tetapi orang pada melongo ini bandara mana ada pesawatnya terbang ngak, apa ada yang ke Surabaya, memang jalurnya belum jelas, jadi transportasi darat juga mengkonektikan jalur darat, transportasi umum antar Kecamatan antara kabupaten juga belum jelas, tetapi saya tetap apresiasi ini sebuah lompatan, disisi lain yang urusannya dengan kementerian perhubungan dan kementerian PUPR, tetapi dalam konteks desa bandara Kertajati ini juga saya cape juga lelah juga mendengarkan desa-desa puluhan desa disekitarnya.

Jangan sampai ini nanti bandara ini kalau operasional akan terjadi perputaran keuangan yang puluhan trilyun setiap tahunnya pak, sementara lahan-lahan disekitarnya sudah milik orang lain, tidak tahu milik negara mana, laporan dari masyarakat desa tanah ini sekian hektar milik ini, milik ini jadi desa itu jadi penonton, tetapi saya lihat yang optimis itu didesa ini di Jawa Barat ini, SDM masyarakat desa itu disetiap desa itu bagus-bagus SDM-nya, tetapi harus dibangun paradigmanya, skilnya, saya minta perhatian ada skala prioritas buat kementerian desa, daerah-daerah yang menjadi proyek nasional itu menjadi prioritas, jangan sampai kita mau nanti pesawat sehari ratusan pesawat terbang dibawahnya masyarakat nya nuzubilang, keleleran pak, itu rakyat kita, malah orang asing yang disitu, jadi mental desanya harus disiapkan pak, sedih kita malu pak, jadi secara SDM saya optimis, SDM desa ini untuk di Jawa Barat banyak disetiap desa untuk ratusan sarjana, cuma mentalnya paradigmanya harus dibangun, jadi Kepala Desa ini harus melibatkan SDM masyarakat sekitarnya yang cerdas-cerdas, kadang-kadang yang jadi Kepala Desa itu pak asal berani saja pak, jadi Kepala Desa pak, didesa sekarang ini punya mental pemberani saja jadi desa, sementara yang sarjananya bengong.

Untuk itu Pemerintah harus mendampingi, ini satu point, point lain juga pelabuhan Patimban pak, ini besok akan hadir masyarakat stakeholder sekitar Patimban di Subang, ini juga harus disiapkan, jadi daerah-daerah yang menjadi proyek nasional pada intinya kementerian desa harus menjadi prioritas sehingga masyarakat desa itu bergerak ekonominya, mentalnya tersiapkan, kalau secara basic dasar saya lihat desa di Jawa Barat, basic SDM nya bagus-bagus, tinggal paradigmanya, skilnya, hanya tinggal finishingnya saja, mungkin diluar Jawa masih terbatas, tetapi finishing pasnya, sekali lagi saya terima kasih kepada Menteri Desa dan jajarannya, *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.

KETUA RAPAT:

Silakan pak Anton, siap-siap pak Gatot Sudjito.

F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.Si.):

Terima kasih pimpinan.

Rekan-rekan Komisi V DPR RI yang saya hormati.

Pak Menteri dan seluruh jajaran.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pak Menteri, pak Dirjen, paling banyak Sumatera Utara, yang dapil saya dicatat cuma 4 saja, nanti saya ulang lagi, saya melihat satu provinsi itu ada 80, dari mana latar belakang ini keadilan pak, sama anggota semua pimpinan rapat sama.

Ada yang 80 disini, ada yang say alihat hampir 100 milyar satu provinsi, saya kok 2 milyar tidak ada, saya kira paling banyak ngomong di Komisi V DPR RI jadi masih bisa dirubah pak Sekjen, karena Sekjen (rekaman tidak jelas).

Pak Menteri waktu minggu yang lalu saya telepon, jujur saya katakan Kepala Desa sekarang lebih takut lihat Kapolsek daripada lihat Bupati, apalagi (rekaman tidak jelas) didaerah tertentu seperti Sumatera Utara, kalau sulit kenapa harus di permudah, kalau mudah kenapa di persulit yang saya lihat apa kita negara yang mau maju ini tidak bisa percaya Kepala Desa yang sesudah di pilih secara demokratis bahkan sekarang pak Menteri banyak tugas memiliki kerja 2-3 tahun yang lalu.

Ya kalau di Jawa mungkin agak tertib, patuh hukum, hukumnya berjalan kalau Sumatera Sumut, semua urusan memakai tunai, yuk jujur, jadi tolong kasihan, sebagian kepala desa mengadu kepada saya, (rekaman tidak jelas), berilah. Sumatera Utara itu pak, orang kuliah itu selesai kuliah bapak saya nanti tidak belanjai saya, dilama-lamain kuliah, selesai kuliah jadi PNS,

tidak dapat PNS kontraktor, kontraktur nguntung tidak dapat, jadi wartawan, jadi wartawan tidak dapat, jadi LSM, LSM tidak dapat baru tim sukses, tolong dibayangi pak, kalau satu desa dikelilingi LSM.

Kasih, ini tolonglah, kalau aku sih negara yang mau maju kita percaya ujung tombak, tetapkan kalau (rekaman tidak jelas), masa Bupati lewat saja, (rekaman tidak jelas) Kapolsek lewat, 7 jam sebelumnya harus stanby nunggu Kapolsek, takut di GRI, jadi dikaji kembali sudah bagus, tetapi kasihan dia kepala desa, LSM 18, penegak hukumnya (rekaman tidak jelas) jelas, sini sekian, jelas pak, ini sekian, ya jelas pak, kasihan DPRD yang ditangkap gara-gara 10 juta berapa juta sebenarnya yang bisa ditangkap lagi, jadi tolong di kaji dan ini (rekaman tidak jelas), 33 kabupaten, saya lihat ada yang 80 ada yang 3 milyarnya 12, ya pak Menteri ya, sama pak Sekjen diwangi karena ini adalah tahun politik yang terakhir, demikian juga kami di BURT ini tahun politik segala upaya kami bikin, kebutuhan sekjen kurang kebutuhan anggota DPR pun kurang, jadi terima kasih.

Terima kasih pimpinan, Kang Mas wakil ketua Komisi V DPR RI
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik pak Anton, pak Lasarus mau interupsi, silakan saja, ini memang pak Menteri saya juga sudah buka dari depan sampai belakang, kita memang dari dulu pak berdebat di Komisi V DPR RI ini soal kriteria, kriteria daerah tertinggal kemudian penentuan skala prioritas dan sebagainya, berdebat panjang, itu kalau saya tidak salah disebelah kiri mantan Sekjen, tidak tuntas pak kita, jadi kalau menurut saya pak Menteri arif dan bijaksana, ini kan kementerian khusus diadakan dulukan ada jalan ceritanya Kementerian PDT, sebetulnya pak bisa di ,... oleh kementerian lain begitu tetapi karena memang tidak tercover di kementerian lain ya sudah bikin kementerian khusus saja, untuk daerah tertinggal ngurus desa, sekarang ngurus transigrasi lagi.

Saya juga melihat pak contoh kami di Kalimantan Barat sudah buka kami dari depan sampai belakang, memang minim pak minim tetapi saran saya pak sebelum kita bertemu dengan esekon I supaya tidak ramai, inikan kita rapat dengan Menteri tentu tidak bicara detail secara kebetulan pak, dan kami pertajam dengan Eselon I nanti, saran saya pak dari buku ini tolong dielaborasi lagi pak seperti tadi yang dari Papua ngomong sahabat saya tadi sampaikan bahwa mungkin tidak timbangan itu tidak mungkinlah bisa sama betul pak, tetapi paling tidak lihatlah kita di Komisi V DPR RI ini, saya ini pimpinan Komisi pak, nanti menandatangani persetujuan APBN nya bapak, kalau saya tidak tanda tangan kan tidak elok pak Menteri, apalagi saya dari partai pendukung, ya kan, kita dukung terus biar nyungsep juga dukung terus iya kan.

Aku lihat disini bang, tidak ada yang bisa saya banggakan di dapil saya, minim sekali, dari semua Direktorat pak saya sudah lipat semua ini satu lembar buku, jadi saya tidak perlu bicara detail, tidak elok nanti kalau saya ngomong ya sudahlah saya mengingatkan saja, nanti denagan Eselon I nanti di elaborasi lagi pak.

Kepantasan, kepatutan dari aspek pemerataan pak, kan ada kriteria-kriterianya semua pak, apa kriteria daerah tertinggal, programnya kalau misalkan program transmigrasi dimana saja lokasi transmigrasi, daerah mana yang paling banyak menampung transmigrasi itulah pak, ini sudah daerahnya tertinggal jujur saja seperti ini tempat kami pak, kami didatangi transmigrasi bukan tidak beban juga pak daerah, beban juga pak, tentu saya tidak bisa sebutkan, karena saya bicara soal NKRI pak, negara kesatuan Republik Indonesia, karena kita adalah daerah tertinggal, lokasi transmigrasi, programnya minim pula, jadi itu saja masukan dari saya pak Menteri, kita tidak bicara substansi, karena buku ini kita sama pegang, ditempat saya masih sama dengan yang ditempat bapak, saya mohon nanti rapat dengan Eselon I, tolong di perbaiki pak, terutama Dapil kami yang ada di Komisi V DPR RI supaya kita ada ya ada tenggang rasa antara kita disini, kalau saya tandatangan tidak ikhlas bapak juga nanti dapat ketidak ikhlasan dari saya loh pak.

Begitu pak Menteri terima kasih, *Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Silakan bu Restu.

F-PDIP (HJ. SADARESTUWATI, SP, M.MA):

Terima kasih pimpinan.

Melanjutkan saja sedikit menambahkan dari pak Lasarus, kebetulan inikan masih global semuanya seperti di Jawa Timur Dapil saya sendiri, inikan disebutkan sekian-sekian sementara Dapil saya sekarangkan ketambahan satu orang, sesama satu Komisi V DPR RI jadi saya tidak ingin tabrakan, tolong nanti disaat rapat berikutnya supaya kami juga tidak tabrakan disini disebutkanlah kabupaten ini siapa-siapa, supaya kami juga satu Komisi V DPR RI ini berjalan sama-sama enaknya di kementerian juga sama-sama enaknya, saya kira itu saja, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik sekarang pak Gatot Sudjito, selanjutnya siap-siap pak Jhony Alen dan pak (rekaman tidak jelas), silakan pak.

F-PG (Drs. H. GATOT SUDJITO, M.Si):

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Pimpinan pak ketua Komisi V DPR RI yang sangat kami hormati.

Kawan-kawan Komisi V yang sangat kami banggakan,

Dan Pak Menteri beserta Dirjen yang hadir dan seluruh jajaran yang sangat kami hormati.

Pak Pimpinan,

Kebetulan ada 2 pimpinan kita yang baru datang dari umroh, selamat datang di tanah air Pak, semoga menjadi haji mabrur, sehingga memperkuat aura dan marwahnya Komisi V.

Pak Menteri,

Langsung saja Pak. Dalam kaitan progress dari tahun ke tahun, dua tahun ini barangkali Kemendes itu sudah agak bagus. Kalau dulu itu jangankan itu, aspirasi anggota, kita rapat berjam-jam, tidak satupun itu locus-locus yang kita usulkan itu diakomodir. Ini adalah sesuatu, walaupun saat ini, progress itu kita lihat adalah masih ada juga yang belum. Locus yang kita usulkan di misalkan di Ponorogo, misalkan, itu memang ada itu, tapi bukan locus kita. Nah ini yang menjadi sesuatu, lokasinya sama, tapi misalkan di Trenggalek, ini persoalannya Ponorogo dan Trenggalek. Contoh konkritnya begitu Pak, itu misalkan di khususnya PPMD ya, itu adalah pembangunan usaha Takau di Jatiperahu Watulimo dan pengembangan usaha ikan asap itu di Watulimo, itu sebetulnya justru usulan kita di Karanggandu dan Desa Tasikmadu. Tapi locus dan materinya berbeda, tetapi kami juga pernah mendapatkan itu. Ini menjadi sesuatu. Contohnya yang kedua, misalkan, di Ponorogo itu didalam proses embung yang kita usulkan adalah misalkan di Desa Maguan Kecamatan Sambit, misalkan. Tetapi pelaksanaannya adalah di Budak Ponorogo. Misalkan begitu. Jadi tolong ini sesuatu yang harus terus diperbaiki agar kemitraan ini betul-betul menjadi mitra yang baik, mitra yang sejati, begitu.

Pak Menteri,

Jadi saya melihat bahwa PPMD itu kan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dimana ada proyek BUMDes, proyek Prokades, inovasi teknologi pertanian, misalkan. Kemudian Puded adalah Usaha, jadi Permodalan Usaha Ekonomi Desa. Kemudian PKB itu ada proyek yang bantuan yang agak bermanfaat, saya langsung saja pada kepentingan-kepentingan dapil saya, karena kalau misalkan itu adalah Jatim VII itu Ngawi, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan itu tidak akan berbicara tentang masalah urusan transmigrasi dan sebagainya.

PKB (Pembangunan Kawasan Perdesaan) disitu ada pasar desa. Kemudian ada BUMDesmar. Kemudian embung besar, kemudian produk unggulan kawasan, itu langsung-langsung saja, itu yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat di wilayah Jawa Timur khususnya adalah Jatim VIII.

Persoalannya adalah itu adalah itu adalah, ada misalkan program yang diresmikan Pak Max waktu itu adalah pasar desa di daerah di wilayah Trenggalek, dan itu tepatnya adalah di Ulena. Sampai ini mangkrak, tidak bisa berfungsi apa-apa, karena itu tadi, kementerian, terutama saya pikir Pak Menteri dengan segala daya dan upayanya, begitu ini, mendorong, tetapi Eselon I nya harus menopang betul keinginan dan harapan Pak Menteri ini. Kalau tidak ya sama saja, bohong begitu. Nah oleh karena itu yang namanya, mohon urusan yang setengah mangkrak-mangkrak ini diselesaikan, Pak Menteri.

Nah saya mendengar dari seluruh Indonesia ini, keluhan-keluhan dari wilayah-wilayah terkait dengan urusan yang namanya mesin-mesin mulai pertanian, mulai yang namanya urusan kopi dan baik itu di daerah Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Aceh, itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Eman, itu uang negara. Oleh karena itu dievaluasi, diinventarisir, mana yang sekiranya program dan proyek itu jangan semuanya adalah dikategorikan proyek itu kadang-kadang diartikan negative, begitu. Nah oleh karena itu mana yang sekiranya pekerjaan-pekerjaan yang itu tidak tuntas, itu diselesaikan. Makanya saya tawaran tadi, catatannya Bapak Dirjen tadi adalah bahwa BUMDes itu sekarang ada 1200. Itu ada manfaat yang baik, itu direspon baik, manakala kalau kemarin itu tahun 2018 itu anggota diberikan locus, artinya kuotanya itu 10 BUMDes. Kalau misalkan itu ditambah 10, kaitannya dengan Pak Anton Sihombing tadi bicara, ini tahun politik dan sebagainya, itu menjadi 20, ini akan baik, begitu. Misalkan begitu.

Nah program-program yang itu menyentuh ke masyarakat dan kemitraan itu bisa berjalan, manakala Pak Menteri atau Eselon I memberikan *guidance* kepada kita untuk bisa, usulan dalam arti kebutuhan masyarakat ini betul-betul bisa disentuh kepada anggota Komisi V yang itu saat ini akan bertarung habis dalam rangka untuk bisa dipercaya rakyat kalau itu mendapatkan kesempatan ini adalah sungguh bijaksana dan baik, Pak Menteri. Memang ada beberapa persoalan-persoalan yang memang harus dituntaskan. Karena proyek itu akan membuat citra kementerian ini tidak baik. Karena bagaimana sebuah investasi pemerintah tetapi itu tidak tuntas dan seakan-akan ini kinerjanya jelek dan potret dari investasi dan keuangan negara ini, ini akan mangkrak dan tidak bermanfaat kepada masyarakat. Saya pikir banyak pekerjaan, saya pikir Pak Menteri sudah luar biasa melakukan apresiasi kepada kita. Tetapi itupun tidak bisa Pak Menteri saja, itu harus ditindaklanjuti Eselon I. Tanpa itu, karena fungsi staffing, harus bisa betul-betul diwujudkan sampai kepada pelaksanaan dan penuntasan program. Dan

saya pikir Pak Lazarus tadi mencermati buku yang tebal yang ada di depan kita itu, memang ini perlu keseimbangan Pak, karena disitu ada wilayah-wilayah yang kurang seimbang disitu. Saya melihat, mencermati ini, saya coret-coret tadi. Jadi ada keseimbangan. Tapi kalau berbicara masalah prioritas program, prioritas daerah, itu apakah sudah menjadi pertimbangan dengan beberapa kebutuhan-kebutuhan masyarakat, apalagi sisi lain adalah masyarakat yang turun ke bawah, dan itu adalah Komisi V untuk memperjuangkan dapilnya.

Saya pikir itu Pak Menteri yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat disisir kembali mana yang sekiranya adalah proyek-proyek maupun program maupun peralatan kaitannya dengan inovasi pertanian yang itu tidak jalan dan tidak bermanfaat, itu bisa diteruskan agar bisa betul-betul bermanfaat.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Gatot.

Pak Menteri, ini potong sedikit sebelum anggota yang lain ini. Setelah Pak Lazarus interupsi tadi, rupanya masih curhat di sebelah saya. Memang akhirnya melelehjuga saya Pak. Jadi daerahnya daerah Pak Lazarus ini Kalimantan Barat dibandingkan dengan Nusa Tenggara Timur, itu perbandingan programnya 5:16. Kemudian ada lagi program yang perbandingannya 6:46, 8 kali lipat. Saya sih sebagai partai oposisi, senang saja, Pak, tidak pernah, Pak Menteri sayang kepada kami. Kan Dapil NTT itu dapil oposisi, Pak. Tapi kasihan juga ini pemilih pemenang pemilu ini. Jadi proporsional tadi. Kata-kata saya tadi catat betul apa yang disampaikan oleh Pak Gatot, dan mungkin kriterianya Pak. Itu saja saya kira. Saya sempat meleleh tadi Beliau, sambil, saya kira itu ya.

PIMPINAN KOMISI V DPR RI (Ir. FARY DJEMY FRANCIS, MMA):

... partai oposisi Pak. Saya lihat NTT memang banyak, tapi bukan dapil saya Pak, itu juga persoalan. Karena ini Dapil I, Dapil II. Tapi saya kira ini kita bisa sinkronisasi Pak. Yang paling banyak malah di dapilnya Pak siapa ini, Pak Syahrulan Pak, di Flores. Bukan dapil saya. Dia bilang ini dapilnya Pak Fary lagi, sesama oposisi.

F- PG (Drs. H. GATOT SUDJITO, M.Si):

Kita partai oposisi, senang sekali rupanya Pak Menteri.

Pimpinan,

Interupsi, Pimpinan.

Pak Sigit,

Jadi memang disini juga kita lihat Jawa Timur. Jawa Timur juga begitu. Dapilnya itu dapil VII tapi bukan dapil, anu, bukan wilayah-wilayah kita. Ini perlu sinkronisasi Pak. Karena jangan sampai memang diusulkan banyak tetapi sama sekali tidak menyentuh yang namanya anggota Dewan di Komisi V.

Saya kira itu Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, kita kembali lagi ke laptop.

F- PAN (H. SUNGKONO):

Ketua,

Sebentar interupsi.

Karena tadi menyampaikan data ya, dapil Jawa Timur I, anggota DPRnya di sini itu ada berapa? Pak Bambang, Pak Ketua, saya, Cuma 2 Pak. Bapak bisa lihat itu Sidoarjo, Surabaya, mendingan tidak dikasih saja semua, biar tidak berantem ini bertiga.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira kita kembali ke laptop dulu ya Pak ya. Kita kembali ke penanya, disini ada Pak Jhoni Allen, ada Pak John Siffy, selanjutnya ada Ibu Saniatul Lativa.

Monggo, silakan Pak Jhoni Allen, siap-siap Pak John Siffy dan Ibu Saniatul Lativa.

F- PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang pertama selalu kembali lagi kepada format, Pak Menteri. Karena kita sudah RKA KL. RKA KL itu adalah Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga. Sehingga kita membahas ini anggaran, kalau kemarin itu pagu indikatif, pagu definitive. Sekarang sudah bicara anggaran 2009 yang terdiri daripada Direktorat Jenderal Bapak.

Dari sisi lain, anggaran Bapak yang sudah diketok diantara Pemerintah, Rp4,325 triliun dan seterusnya. Dengan penyebaran anggaran dari katakanlah dukungan manajemen, saya masuk kepada penelitian, pengembangan, pendidikan, pembangunan daerah pemberdayaan masyarakat yang paling besar Rp2,175 triliun. Dalam lampiran ini juga sebetulnya bukan matriks, Pak. Kalau matriks, lain lagi Pak. Ini masih mentah. Tapi kegiatan, jadi tidak matriks. Kenapa? Ini akan ditandatangani pimpinan nanti dibelakang. Bukan, kegiatan, lokasi. Pertama Pak, saya tidak tahu, ini jumlah disini Rp1,9. Apa iya? Karena apa? Ini tidak semua bisa mengikuti, karena formatnya. Rp1,9 triliun. Sementara disini Rp2,175 triliun. Yang mana yang Bapak pakai? Kalau ini jumlah yang diatas ini, per Direktorat Jenderal, 2,1. Halamannya tidak ada Pak. Buka Bapak, halaman kedua yang paling nomor 1 ini Pak Menteri. Di matriks Bapak ini, karena gambaran saya ini jumlah. Karena jumlahnya tidak ada dibawah. Coba Pak, siapa yang membuat ini? Masak tidak paham, Eksekutif? Harusnya yang paham dong, yang membuat ini siapa? Rp1,9 triliun. Demikian juga nanti ... tidak sinkron, disini Rp2, 1 triliun. Kecuali ini saya tidak tahu ini, apa kode ... atau apa.

Demikian juga yang lain, nanti kita lihat Pak, ... ini tidak sinkron. Artinya ada anggaran yang belum teralokasikan. Mari kita lihat lagi. Di Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, misalnya, daerah tertentu. Rp2,15 miliar, disini Rp1,75 miliar. Nah kembali lagi Pak, apakah gaji melekat disetiap Direktorat atau dalam konteks gaji, Bapak kok tidak? Namanya gaji Pak, sudah menjadi belanja pegawai. Belanja pegawainya sudah harus tersendiri. Berarti tidak sesuai dengan ininya. Kan belanja

pegawainya harus *clear* dong, kalau begitu Pak, bicara kegiatan, format yang lain semua, belanja gaji, belanja barang, belanja apa, modal atau operasional, itu format Pak, tidak ada.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri,

Nanti dijawab.

F- PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M):

Pak,

Ini bicara format Pak, Bapak tidak boleh berubah daripada format yang sudah dibuat oleh normative, universal. Artinya dengan kata lain jawaban Bapak, gaji itu masuk di dalam setiap Direktorat, dimasukkan dalam anggaran ini. Itu menurut saya format yang salah. Karena apa? Belanja pegawai adalah tersendiri dari seluruh departemen itu Pak, kementerian itu. Bapak lihat departemen lain, belanja pegawai pertama itu, baru belanja barang, baru apa kegiatannya disitu. Itu formatnya Pak, ini bicara format. Nah artinya, berarti kita tidak bisa nyambung dengan format Bapak ini. Karena apa? Kementerian tidak boleh bikin format sendiri Pak. Ini saya bicara format ketentuan perundang-undangan dan ini bukan baru tahun ini Pak. Saya sudah 10 tahun Pak. Dan juga yang lain begitu Pak, belanja pegawai Pak. Memang disini saya tidak lihat belanja pegawai, tapi dukungan manajemen ini apa, misalnya. Saya tidak mengerti apa maksudnya.

Nah artinya Pimpinan, memang agak sulit kita ini, kalau begini. Kalau dibilang belanja gaji di setiap direktorat ya tidak sinkron nanti disini. Kalau setangkapan saya, ini berubahlah anggaran yang teralokasikan. Tapi kalau Bapak bilang, belanja gaji belum, tentunya ini modul ini dikembalikan kepada modul yang norma, sebagaimana yang lain.

Yang kedua, ada satu juga, karena ini tidak ada halaman Pak. Ini saya agak menyolok-menyolok saja ini. Di juga ini misalnya, tapi ini mungkin salahlah, salah masukkan, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu dua di depan, harusnya ini Transmigrasi. Ada hal yang sangat menyolok disini, ada program yang ... ada yang Rp10 juta, dengan judul yang sama dan daerah yang berbeda. Dalam Direktorat Jenderal Kawasan dan

Pembangunan Pemukiman Kawasan Transmigrasi. Saya akan baca disini dua halaman tidak ada makanya ... Sulawesi Tenggara, Kab. Muna, Kec. Maligamo, Desa Raimuna, pembangunan RTJK dan SAB 1 paket, Rp5, 040 miliar. Dengan judul yang sama di desa yang lain, kecamatan lain kabupaten lain, Sulawesi Tenggara, dengan judul sama, Cuma Rp32 juta. Rp5 miliar versus Rp32 juta, dengan program yang sama hanya kabupaten yang berbeda. Ada Rp3 miliar di Kolaka Timur, Tonggona, sama, pembangunan RTJK dan SAB 1 paket Rp3,349 miliar. Ini saya tidak paham ini, dengan judul yang sama, hanya desa kabupaten dengan jomplang perbedaan anggaran, Rp10 juta versus Rp5 miliar. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan kepada publik? Artinya apa? Tidak mengerti saya, ini membuat anggaran seperti ini. Judulnya tetap satu paket. Rp5 miliar versus ada lagi yang Rp54 juta, dengan judul yang sama, hanya kabupaten dan kecamatan yang berbeda.

Selanjutnya dalam konteks sama dengan teman, Cuma saya tidak bicara dapil, saya bicara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bicara Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya bahwa anggota DPR Komisi V ini tentunya lebih mengetahui daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia darimana dia mewakili. Itu saja bedanya. Lebih mengetahui. Karena mengetahui, tentunya mereka bicara. Oleh karena itulah perlunya ada sinkronisasi di dalam menterjemahkan anggaran kementerian dan lembaga, antara eksekutif dan legislative, sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Disitulah hak untuk kita melegislasi dan memberikan hak budgeting. Baru selesai sinkronisasi, ya. Tidak, ya kita tolak. Itu Undang-undang, bukan kata Komisi V, itu undang-undang. Menyetujui atau menolak, menerima atau menolak. Sama, teman-teman juga yang sebelumnya sebagai anggota sekarang para menteri, itu sama pendapatnya sama, tidak berbeda.

Nah oleh karena itu Pimpinan, dengan formula ini, apalagi ada format yang berbeda, saya tidak beda terlalu jauh, lebih bagus untuk kebijakan Pak Menteri, karena ... tadi itu saya ketemu Pak Menteri, sangat *wise* dan segala macam dalam konteks penterjemahan legislatif eksekutif, bagaimana Komisi V sudah sinkron belum? Itu bagi saya sangat sesuatu yang format ya, itu tadi, beberapa, kan? Tentunya saya belum bisa jawab, karena saya belum bisa baca.

Oleh karena itu saya menyarankan dalam konteks pertemuan kita dengan Menteri dan para instansinya, direktorat jenderal maupun para staffingnya, bahwa barangkali Pak Menteri bisa melakukan semacam katakanlah sinkronisasi dalam konteks kesimpulan kita ini supaya para staffnya, direktorat jenderal maupun direktornya, melakukan sinkronisasi dalam format dan program kegiatan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdasarkan program PDT dan Transmigrasi. Saya kira itu, karena ini memang sangat banyak, tidak mungkin itu barangkali tentunya

sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Bahwa yang lebih banyak mengetahui, eksekutif, pasti. Karena dia menguasai seluruh Indonesia, kita hanya menguasai dari mana kita diutus. Nah disitulah terjadi sinkronisasi. Paling juga legislative itu tidak lebih dari antara 10-15% dalam melihat alokasi. Karena Komisi V ini kan Cuma berapa, 50-an sekian orang dari 600 eh 560. Artinya hanya 10%. Artinya tidak ada sebetulnya yang bertentangan, hanya masalah cara tahapan dan sinkronisasi saja.

Itu barangkali Pak Pimpinan, supaya tidak ada diantara teman yang salah paham, seolah-olah sangat banyak disini, tidak itu pointnya. Tapi mari kita letakkan ini sesuai dengan ketentuan perundangan dalam konteks proporsional, karena anggaran juga terbatas.

Itu Pimpinan, karena kalau mencari, belum sinkron. Itu barangkali yang saya sampaikan, sehingga kita bisa bekerja dengan tim-tim kita, dengan direktorat jenderal, dengan para direktur, tidak memaksakan kehendak, tetapi kalau misalnya nanti belum ketemu, ada lagi disini sebetulnya, ketemu lagi dengan Pak Menteri.

Saya kira demikian Pimpinan, mohon maaf Pak Menteri, ini saya hanya menyampaikan dari apa yang secara universal, tidak ada memaksakan kehendak dalam konteks peraturan dan perundang-undangan.

Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan.

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya Pak John Siffy Mirin dan siap-siap Ibu Saniatul Lativa.

F- PAN (JOHN SIFFY MIRIN):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan segenap anggota,
Yang saya hormati pula Pak Menteri dan jajarannya,**

Selamat sore.

Saya ingin bicara singkat saja.

Dari awal sudah disampaikan kepada Pak Menteri bahwa dalam postur anggaran tahun 2019 harus melihat asas pemerataan, keadilan dan urgensi. Misalkan kami di Papua itu kan ada 7 wilayah adat, terus ada daerah terpencil, daerah tertinggal, ada terisolir. Saya lihat dana alokasi yang dibuat oleh Kementerian Desa ini sangat luar biasa, misalnya di daerah Merauke itu ada 18 paket, terus daerah Keerom itu ada sekitar 16 paket. Setelah saya otak-atik, buka kiri-kanan dari a sampai z belakang, ternyata tidak ada asas pemerataan ke seluruh wilayah Papua, 29 kabupaten/kota, bahkan juga di Papua Barat. Papua ini kan ada daerah terisolir, ada daerah terpencil. Beberapa waktu lalu kita sempat dengar, di daerah Korowai itu ada misionaris yang namanya Johnson, itu beliau melakukan pelayanan disana dan banyak versi dan ada dari elemen-elemen tertentu menyatakan bahwa ini beliau masuk seperti ini dan segala macam dan bisa cabut passportnya dan tidak boleh memberikan izin imigrasinya segala macam, karena beliau pelayanannya memang betul-betul serius didaerah-daerah yang sangat terpencil. Maksud saya disini, dari Kementerian ini bisa lihat, daerah mana yang betul-betul terpencil dan terisolir. Kalau kita lihat di daerah Merauke, ini di daerah transmigrasi, ini bukan memberdayakan orang Papua asli, tapi justru 70% penduduknya adalah non Papua. Termasuk Keerom. Tujuh puluh persennya itu orang warga transmigrasi. Bagaimana nasib masyarakat-masyarakat kita yang ada di daerah-daerah terisolir atau terpencil? Misalnya saya sekarang dengan kehadiran Pak Willem di Komisi V ini, kabupaten kami, Tolikara saja tidak masuk, apalagi daerah-daerah lain. Kami malu dong, kalau misalnya beberapa waktu lalu kan banyak masyarakat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mereka sampaikan, "Kami sudah kasih masuk surat ini tapi tidak pernah dijawab segala macam". Kami sebagai representative dari masyarakat Papua, yang berasal dari Kab. Yahukimo yang ada ditempat ini saya merasa malu, kalau tidak ada satupun nama Kab. Yahukimo di tempat ini, karena dua kali saya sudah bicara. Itu khusus untuk kabupaten saya. Belum yang lain-lain.

Jadi mohon Pak Menteri, mohon maaf, di Papua ini kan ada 14 suku terasing yang masih hidup diatas pohon, yang belum dijangkau oleh Pemerintah. Belum ada sarana ... air bersih, bahkan satu lembar seng pun belum kelihatan di gunung-gunung. Maka pada RDP waktu lalu saya sudah jelaskan kepada Pak Menteri, mohon lihat seluruh daerah-daerah terpencil dan terisolir. Itu maksudnya supaya pada waktu menyusun APBN ini, lihat daerah yang belum dijangkau. Karena saya merasa, karena macam di Yahukimo ada daerah yang sangat terpencil itu di Korowai, Korowai Utara, Korowai Timur, dan selatan, sekitarnya. Belum daerah Duga dan sekitarnya itu masih ada daerah yang belum dijangkau. Jadi mohon maaf Pak Menteri bisa lihat aspek-aspek ini. Nanti saya lihat keseimbangan di beberapa daerah yang betul-betul dibutuhkan masyarakat daerah terpencil itu seperti apa. Karena ada desa yang sudah maju, ada desa yang belum maju. Kalau

wilayah Jawa Barat, wilayah Jawa Timur dan lain-lain ini kan wilayah yang sudah maju. Kayak kemarin kami ke Desa Ngaroko, itu desa sudah maju, banyak produk unggulan yang dipamerkan disana, sudah maju. Belum daerah lain.

Jadi saya harap kalau memang diperbaiki, apa ke depan bisa dilihat semua daerah urgensinya apa. Terus permohonan dari pemerintah daerah ke Kementerian Desa itu seperti apa, bisa dilihat lagi. Jangan sampai mereka telepon ke kami, "Kami sudah masukkan permohonan tiga tahun lalu tapi sampai hari ini belum dijawab". Dikirim WA lagi, buktinya dikirim lagi, tapi ya mohon maaf, saya mesti sampaikan pada hari ini supaya bisa dilihat, begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak John.

Lanjut, Ibu Saniatul Lativa.

Siap-siap Pak Sahat Silaban.

F- PG (Hj. SANIATUL LATIVA):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati para Pimpinan Komisi V,

Anggota Komisi V,

Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen dan seluruh jajarannya yang hadir yang saya hormati.

Sebagai partai pendukung Pemerintah, mungkin saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri, untuk mewujudkan Nawacita Bapak Presiden Joko Widodo yang ke-3, yaitu membangun daerah dari pinggiran, yang bekerja keras untuk menghidupkan BUMDesa. Nah ini ada maunya ini Pak Menteri, supaya anggaran BUMDesa yang masih nyantol di Dirjen PPK segera dicairkan, karena informasi yang baru saya dapat juga memang sudah diverifikasi tetapi anggarannya belum cair sampai dengan

saat ini. Sedangkan kita sudah membahas kembali untuk BUMDesa yang di tahun 2019.

Kemudian mengenai pendamping desa, tadi sudah disampaikan oleh rekan saya sedapil yaitu Pak Bakri, karena saya satu dapil Pak, dengan Bapak Bakri, jadi supaya tidak ada kecemburuan diantara kita mengenai aspirasi untuk Dapil Jambi, Pak.

Yang kedua, saya mau menyampaikan mengenai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa ini supaya bisa disinkronkan dengan Permendes Nomor 19, karena disitu dibunyikan mengenai prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Yang mana disitu tidak disebutkan untuk pembangunan tempat ibadah, untuk membangun tempat ibadah. Sedangkan untuk tempat ibadah ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa, terutama masyarakat desa yang sangat terpencil. Sehingga mohon untuk undang-undang ini bisa direvisi agar tidak ada temuan untuk kepala desa yang melaksanakan, sehingga apa yang disampaikan oleh terdahulu saya, senior saya, bahwa pidato Ibu Menteri Keuangan kemarin pada saat tanggapan Pemerintah terhadap fraksi-fraksi, itu tidak terjadi, Pak. Karena kita tahu LSM ada dimana-mana, pun demikian dengan penegak kita pun juga, kalau ada sedikit saja, sudah terus dijadikan ATM. Kan kasihan Pemerintah desa kita, terutama Pak Kepala Desanya. Itu point yang kedua.

Kemudian yang ketiga, saya melihat untuk kriteria pengembangan kawasan transmigrasi Pak, yang tadi sudah disampaikan juga, ditanyakan oleh pimpinan saya Bapak Lazarus, mohon dijelaskan mengenai kriteria pengembangan kawasan transmigrasi. Karena saya lihat disini semuanya ada di Tanjung Jabung Timur. Padahal transmigrasi, daerah transmigrasi untuk wilayah Sumatera terutama di Jambi, itu yang baik itu ada di wilayah Kecamatan Rimbo Bujang, Rimbo Ulu, Rimbo Ilir, yang ada di wilayah Kab. ... itu yang paling pertama Pak, yang paling pertama di wilayah Jambi. Bahkan pasarnya saja, Pasar Sarinah itu sudah terkenal sampai wilayah Riau sana. Namun sampai dengan saat ini belum pernah mendapatkan prioritas kegiatan untuk pengembangan kawasan transmigrasi. Jadi saya minta disini kriterianya apa, supaya nanti jika kami ditanya oleh dinas maupun masyarakat sana, kriterianya seperti apa, apakah ditetapkan oleh SK dan lain sebagainya, kami bisa menjawab. Dan untuk bisa diajukan agar mendapatkan program pengembangan untuk wilayah transmigrasi ini. Mungkin Pak Menteri bisa berkunjung kesana Pak, karena jalan-jalan untuk transmigrasi itu rata-rata memang sangat memprihatinkan. Itu point yang ketiga.

Kemudian yang keempat Pak Menteri, mungkin Pak Menteri bersama seluruh jajarannya memiliki data, baik Pimpinan maupun anggota Komisi V beserta dengan dapilnya. Nah barangkali ketika Bapak Menteri maupun para Dirjen turun ke daerah dan membawa bantuan untuk program-program strategis nasional khususnya, *mbok yao* kami ini yang Komisi V ini diajak

begitu Pak. Kemarin pada tanggal, beberapa hari lalulah, acara kegiatan Harganas di Tanjung Jabung Timur, saya tanya kepada Pak Bakri, "Pak Bakri kemarin hadir tidak di acara itu?". "Saya tidak tahu, dikasih tahu, tapi saya hadir bukan sebagai anggota DPR tapi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pak", makanya saya hadir. Dan disitu bertemu dengan anak buahnya Bu Lina, Pak siapa ya kemarin itu, Pak Direktur PPMD. Ketika acara di mulai dan disitu menyerahkan beberapa point bantuan untuk transmigrasi. Nah kalau kita dipanggil kan enak, begitu lho Pak. Karena ini kan masa-masa tahun politik, sehingga apa yang kita perjuangkan disini, masyarakat tahu, nyata. Jadi di Jambi itu ada anggota Komisi V dua orang, yaitu Bapak Bakri dan Ibu Hj. Saniatul Lativa.

Demikian Pak Menteri, mohon diperhatikan.

Terima kasih Pimpinan, saya akhiri.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Oh ya, satu pendukung, satu oposisi. Harusnya yang pendukung yang diprioritaskan ya? Demikian Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Baik, Bu Saniatul Lativa.

Selanjutnya Pak Sahat Silaban. Terus siap-siap Pak Hamka B. Kady. Silakan Pak.

F- P. NASDEM (SAHAT SILABAN):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan,

Yang saya hormati Bapak-Ibu serta anggota Komisi V,

Yang saya hormati Pak Menteri Kementerian Desa,

Beserta Bapak Dirjen dan juga semua jajarannya.

Tadi teman-teman sudah menyampaikan kayaknya memang kalau kita baca ini yang dari kementerian ini masih banyak ketimpangan-ketimpangan Pak. Kami sendiri dari Sumatera Utara ada 3 duduk disini. Jadi ... dan disini, termasuk tadi Pak Jhoni Allen.

Nah kalau kita lihat dari catatan ini, banyak ketimpangan. Terutama soal desa tertinggal. Kriteria desa tertinggal itu saya menjadi pertanyaan ini, apakah kita hanya menerima asal bapak senang? Tidak tahu saya. Karena kalau menurut saya, di Sumatera Utara, khususnya Sumut II itu banyak sekali desa tertinggal. Disana juga masih banyak juga desa-desa yang tidak bisa dilalui kendaraan. Tapi disini saya lihat sangat minim di Sumatera Utara, apakah ini karena keterbatasan dana, ada dari pihak Bapak untuk membuat klasifikasi, apa memang di daerah kami itu tidak ada lagi yang disebut desa tertinggal? Kalau hanya keterbatasan dana, kita juga mengerti, Pak Menteri. Tapi kalau disebut juga disana tidak ada desa tertinggal itu tadi kriterianya, masih banyak desa di 19 kabupaten/kota dan dapil saya Sumut II itu yang tidak bisa dilalui kendaraan. Bahkan kemarin itu apa mungkin kalau umpamanya disebut, dia masih desa tertinggal, di kabupaten-kabupaten tertentu, bisa menjadi dikembalikan lagi dari pemekaran dia menyatu lagi, tidak tahu persoalannya ini. Karena begitu ada pernah, ada bantuan rumah tidak layak huni khususnya seperti di kampung kami disana, hampir semua masyarakat itu mengusulkan, karena memang rumahnya tidak layak huni. Kan begitu. Jadi terus-terang kalau dilihat dari sini, masih banyak ketimpangan Pak, kalau itu hanya keterbatasan dana, apa mau kita bilang. Tapi asas pemerataan itu juga kita tunggu dan perlu diperhatikan.

Nah yang kedua Pak Menteri, maaf ini, kebetulan ada rencana saya mau pindah dapil. Dapil ya Pak Ketua ya? Dari Sumut II menjadi Banten III. Maaf ini saya bukan menjelek-jelekkan Banten, tapi kenyatannya begitu. Saya sudah 32 tahun di Banten. Masih banyak orang yang datang berduyun-duyun dari Tora Banten ke Jakarta, membawa keranjang-keranjang ke Jakarta, masuk got, mencari uang katanya. Saya kira ini bukan tradisi. Kalau dibilang kaki ayam itu mungkin bagian dari tradisi. Yang pasti ini masalah faktor ekonomi. Kalau dibilang tadi seperti daerah saya sudah saya sebut desa tertinggal, maaf ini, kalau di kampung kami sana, walaupun ada buta huruf, itu sudah diatas 80 tahun. Yang buta huruf di kampung kami, di Sumut II sana. Tapi kalau disini, di daerah pinggiran ibukota kita ini, 20 tahun pun banyak buta huruf. Bisa saya tunjukkan. Jangan kita terus hanya berpikir untuk membangun daerah terluar Indonesia, tapi terdekat sekalipun dengan ibukota, kita tidak pikirkan. Nah ini, kemunafikan juga buat kita. Boleh Pak, saya tunjukkan, banyak di daerah Tangsel, Tangerang, buta huruf-but huruf masih banyak. Nah ini, itu, ya sudah pasti itu faktor bukan karena malas sekolah. Faktor ekonomi. Ya jadi harapan kita sebagai anggota DPR disini, tentunya karena kita kan menyampaikan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat itu. Kalau bukan itu, ngapain ada kita-kita ini di legislative?

Jadi tolong Pak Menteri, saya mungkin yang saya sampaikan ini sudah dua unsur, dari Sumatera Utara sana juga dari yang akan dapil saya ke depan. Mungkin mudah-mudahan nanti seperti yang dibilang teman, di jajaran dari Dirjentrans nanti akan kami usulkan lagi yang sangat kita butuhkan di daerah kita masing-masing.

Terima kasih Pak Menteri.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Pak Sahat Silaban ya? Selanjutnya Pak Hamka, siap-siap Pak Bahrum Daido.

F- PG (Drs. HAMKA BACO KADY, MS):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan seluruh anggota yang kami hormati,

Pak Menteri dan seluruh jajarannya,

Pertama saya tidak terlalu banyak, saya hanya menginginkan mudah-mudahan saya juga bisa mengikuti Pak Menteri menyerahkan bantuan. Mudah-mudahan sesama dapil juga bisa menyerahkan bantuan, Pak Menteri. Maksud saya adalah tolong kalau ada turun bantuan BUMDes kah ataukah sebentar yang kita sepakati di daerah pemilihan, tolonglah diajak kami untuk menyerahkan, Pak Menteri. Jangan sampai ada penyerahan ataukah dimulainya BUMDes ataukah dimulainya pembangunan embung, kami hanya diberi tahu bahwa ada. Saya hanya menyampaikan, *alhamdulillah*.

Oleh karena itu kami berharap Pak Menteri, barangkali operasionalisasi dibawah itu tolong dilibatkanlah kami, paling tidak pada saat diresmikan bahwa ada bantuan BUMDes di desa itu, paling tidak kami hadir. Supaya mereka juga tahu, oh Pak Hamka ada gunanya. Apalagi saya tahu, diketahui bahwa mitra saya Menteri Desa. Kalau saya turun Pak, semua persoalan desa, dikemukakan semua. Kemarin saya hampir berantem juga dengan diskusi panjang dengan mereka, "Wah tidak benar ini undang-undang, kenapa desa saja yang dapat bantuan, lurah tidak". Itu perlu ditenangkan dulu supaya disepahami.

Nah oleh karena itu banyak hal-hal yang perlu kami sosialisasikan kepada keberhasilan-keberhasilan apa yang telah dicapai oleh Kementerian Desa. Jujur Pak Menteri, pada saat diluncurkan BUMDes ini dulu sebelum Pak Menteri dulu, saya sudah menyampaikan bahwa konsep BUMDes ini adalah konsep yang cerdas. Karena Dana Desa pada umumnya digunakan untuk membangun fisik. Infrastruktur. Tapi menggerakkan ekonomi desa sepeninggal BUUD/KUD, yang diandalkan sekarang adalah BUMDes. Saya malah mau berpikir Pak Menteri, kita konsentrasi, kalau bisa anggaran itu sekian persen lebih banyak dibanding yang lain, fisik misalnya. Kenapa? Karena fisik itu sudah dilakukan oleh Dana Desa. Ataukah Dana Desa itu kita geser anggarannya agar memperkuat modal Badan Usaha Milik Desa? Membeli gabah, sama BUUD/KUD dulu. Di tempat ini, dipimpin oleh Pak Ketua, saya mengacungi jempol konsep ini. Pak Ketua ya? Oleh karena itu jangan lagi kita pikir sekarang, kalau kita fokus pada daerah tertinggal, barangkali boleh-boleh saja, tetapi Kementerian Desa tidak hanya menangani daerah tertinggal, menurut definisi yang saya pahami. Semua persoalan desa itu pasti Pak Menteri, walaupun sumber Dana Desa itu dari Kementerian Keuangan. Itu saya jelaskan...

Nah oleh karena itu saya mohon Pak Menteri barangkali ke depan, BUMDes ini barangkali kita ramu sedemikian rupa, supaya menginjeksi modal yang cukup, bisa diputar di daerah atau di desa itu. Rp50 juta tidak cukup. Selanjutnya mungkin memang ada kesalahan atau kekeliruan ketik, Pak Menteri, diperbaiki ini. Saya juga mendapati angka-angka mungkin ada kekeliruan menetik, namanya manusia. Kalau indeksnya misalnya ada dua daerah saya disini, Jeneponto misalnya, 2 BUMDes, 2 unit, volumenya Rp300 miliar, eh Rp300 juta, sorry. Artinya pemahaman saya, kalau Rp300 juta itu 6 unit, 6 BUMDes, Rp20 juta satu BUMDes. Mungkin salah ketik disini, mungkin bisa diperbaiki. Karena indeksnya saya kira Rp20 juta kan Pak Menteri? Disini 2 unit Rp300 juta. Mungkin kekeliruan, saya bisa pahami itu, untuk kita perbaiki.

Yang lain-lain saya berharap, semua program-program kementerian jangan ada pahlawan kesiangan, karena kadang kala konstituen saya datang, "Pak, ada yang menawarkan bantuan ini dari Kementerian Desa". "Oh siapa

itu?”, “Dari pemerintahan desa dibawa, apa yang dibawa? Ini, ini, ini. Oh ini tidak benar itu”. “Kalau kami tidak dilibatkan, artinya kami juga tidak ketahui apa programnya Pak Menteri”. Sehingga pengendalian kita juga tidak ada. Disini saran saya bagaimana semua program-program yang ada di dapil kami, tolonglah dilibatkan. Kami hanya membantu Pak Menteri untuk mengawasi, mengendalikan, agar supaya program itu sampai ke masyarakat. Yang intinya adalah tolong dilibatkan kami, apalagi kalau ada penyerahan-penyerahan, yakinlah bahwa apa yang akan kita perjuangkan sama-sama untuk kepentingan bangsa dan negara.

Terima kasih Pak Menteri, Pimpinan.

Wabillahitaufik Walhidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Ya, silakan Pak Bahrum Daido.

F- PD (Dr. Ir. BHRUM DAIDO, M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Dirjen, beserta seluruh jajarannya,
Yang saya hormati Pimpinan serta teman-teman anggota Komisi V,**

Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Menteri, kepada rekan-rekan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, karena setiap kunjungan kerja saya didampingi oleh mereka-mereka, dan hasilnya *alhamdulillah* cukup bagus. Terakhir saya didampingi oleh Pak Dirjen Transmigrasi di Towuti, ada kawasan Mahawoma, ada kawasan transmigrasi.

Jadi yang akan saya pertanyakan disini Pak Menteri, yang tadi tidak disinggung oleh teman-teman, masalah KTPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional). Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional ini tentunya dasarnya Nawacita dan RPJM 2019, dimana akan mengedepankan masalah ketahanan ekonomi dan mengurangi desa tertinggal. Kemudian program pendukung dari pada KTPN itu adalah keputusan bersama lintas kementerian dalam pengembangan KTPN 2017. Dimana di dalam keputusan kementerian itu, saya melihat ada 5 KTPN di Indonesia yang ditunjuk di dalam Surat Keputusan Bersama Menteri, yang pertama KTPN Dompu, Kab. Dompu. Yang kedua, KTPN Tanjung Kab. Berau, yang ketiga KTPN Towuti Kab. Luwu Timur, dan yang keempat KTPN Morowali Kab. Morowali, yang kelima KTPN Maritengai Kab. Sidrap. Baru-baru ini saya bersama Pak Dirjen Transmigrasi melakukan kunjungan ke KTPN Towuti. Saya melihat disana di Towuti, mungkin secara kebetulan di KTPN Towuti itu ada daerah Transmigrasi yang namanya wilayah Mahalona. Yang saya akan tanyakan, setelah kami mau membangun daerah wilayah transmigrasi yang ada istilahnya KTM (Kota Terpadu Mandiri) saya juga jadi bingung, mungkin nanti Pak Menteri bisa menjelaskan kepada saya, apa hubungannya KTPN dengan KTM. Saya melihat, di dalam keputusan bersama lintas kementerian, dimana tujuannya untuk pengembangan infrastruktur PUPR, ditambah dengan infrastruktur yang lain, yang didukung oleh Kementerian non PUPR. Berarti disini adalah merupakan daerah strategis nasional yang 5 desa ini. Yang saya akan tanyakan kepada Menteri, sampai dimana kinerja dari pada semua kementerian terhadap 5 desa yang dikatakan di dalam KTPN di Indonesia ini, Pak Menteri? Karena saya barusan dari Luwu Timur, di KTPN Towuti, sama sekali saya melihat data hukum untuk pembuatan pembangunan jalan. Dasar hukum yang menyatakan jalan ini merupakan daerah strategis nasional, jalan strategis nasional, wilayah strategis nasional, itu tidak ada regulasinya. Saya cari di Kab. Luwu Timur, dari Kab. Luwu Timur juga belum bisa memberikan regulasi daripada kerja sama antar kementerian dalam rangka menunjang keputusan bersama lintas kementerian dalam pengembangan KTPN yang dilakukan pada tahun 2017.

Barangkali Pak Menteri bisa jelaskan kepada kami, tentang KTPN itu, dan sampai dimana keputusan itu. Karena beberapa waktu yang lalu, setelah saya kunjungan bersama Pak Dirjen Transmigrasi, saya langsung *compare* dengan Kementerian PUPR untuk membantu pekerjaan infrastruktur jalan. Yaitu ada ... disana, tapi dia katakan bahwa secara regulasi, belum ada ketetapan bahwa itu merupakan jalan nasional atau strategis nasional. Jadi saya mau tanya, ini sampai dimana, Pak Menteri?

Kemudian yang kedua, yaitu masalah pembagian Dana Desa. Untuk tahun anggaran 2018, dari beberapa desa yang kami temui di daerah pemilihan kami yaitu di dapil saya, 9 kabupaten, Luwu Timur 4 , 4 kabupaten, Toraja, Toraja Utara, kemudian Enrekang, Sidrap, dan Pinrang, ada beberapa

desa yang belum menerima sekarang itu Dana Desa. Padahal ini sudah bulan September 2018. Nah baru-baru saya baca ternyata di koran, Kementerian Desa baru menyalurkan kurang lebih 60% Dana Desa. Jadi masih ada kurang lebih 40% Dana Desa yang belum terbagi. Nah kapan mau terbagi itu? Kayak saya ini Septemhernya ini, kalau lambat dananya turun, apa yang kita harus bangun, ya Pak Menteri? Jadi harapan saya, kalau bisa di Bulan September itu, semua Dana Desa sudah terbagi ke desa-desa.

Kemudian yang paling ironisnya lagi Pak Menteri, dari semua desa yang saya lihat, itu hampir tidak ada satu desapun yang bisa menyusun pertanggungjawaban keuangan desa, semua diserahkan oleh DPMD, dengan bayaran-bayaran tertentu. Jadi bisnis. Dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di tiap-tiap kabupaten yang ada di Indonesia. Ini realita. Bisa *sampling* nanti uji, mana desa yang Pak Menteri anggap bagus, lihat, siapa yang susun, pertanggungjawaban keuangan Dana Desa. Nah ini cukup berbahaya, kalau sumber daya manusia tiap-tiap desa itu tidak disuntik dengan SDM, khususnya pertanggungjawaban keuangan ini. Jadi bisnisnya Dana Desa itu menjadi bahan bancakan dari orang-orang yang berada di tiap-tiap kabupaten.

Kemudian yang berikut, pertanyaan saya yang ketiga itu, masalah BUMDes. BUMDes ini sangat luar biasa, Pak Menteri, tapi bisa meningkatkan perekonomian desa, pertumbuhan ekonomi desa. Hanya saja perlu pengawasan dan pembimbingan untuk para kepala desa dalam rangka pengembangan dari pada BUMDes. Kadang mereka juga tidak tahu mau bikin apa. Apalagi kalau dari KPBP kurang pengawasan, takut-takutnya BUMDes ini bisa tinggal nama saja, Pak Menteri. Jadi perlu pengawasan yang sangat intensif kepada para kepala desa yang mempunyai BUMDes.

Kemudian yang terakhir, program 2019, mungkin masih bisa verifikasi, Pak Menteri. Saya juga ada 2 orang di Dapil, setelah saya membuka-buka ternyata yang terverifikasi tidak sesuai arahan yang pada saat tenaga ahli kami dipanggil, tidak sesuai. Jadi saya minta nanti ada barangkali format ulang yang diberikan kepada tiap-tiap anggota untuk mengisi tentang kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di tiap-tiap desa, khususnya di desa-desa kami yang ada di daerah pemilihan.

Dan yang paling terakhir barangkali Pak Menteri, kami kurang jelas indikator dari desa tertinggal. Barangkali desa tertinggal kemudian ... yang tertinggal, kemudian apa ya, jadi kabupaten tertinggal, desa tertinggal, indikatornya apa Pak Menteri? Tidak ada keseragaman diantara kita ini, sehingga di Komisi V saja kita tanya, sebenarnya kriteria desa tertinggal itu apa, daerah tertinggal itu apa, itu tidak mengerti, Pak Menteri. Kadang juga ada di daerah yang tidak tertinggal, tetapi ada desa tertinggal. Ada juga kadang di daerah tertinggal, tapi desanya ada yang tidak tertinggal. Dan saya jadi kriterianya agak bingung ini Pak Menteri, barangkali, untuk menyamakan

persepsi diantara kita semua, baik antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, diantara Komisi V barangkali ada kesepahaman dari pada pengertian dari pada desa tertinggal dan daerah tertinggal.

Terima kasih Pak Menteri. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Bahrum, terima kasih.

Yang terakhir dari anggota, Pak Henky Kurniady. Ah kita skors dulu ya, atau dicatat sama Pak Sekjen ya? Pak Henky, tidak apa-apa ya, Pak Menteri keluar sebentar ya?

Silakan Pak.

F- PDIP (Drs. HENKY KURNIADI, S.H.,M.H.):

Terima kasih.

Wah Pak Menterinya keluar dulu, bagaimana ya?

KETUA RAPAT:

Atau kita skors dulu ya? Kita skors lima menit.

(RAPAT DI SKORS)

Silakan dari anggota atau dari Pemerintah yang ingin memanfaatkan waktu untuk melaksanakan sesuatu yang tidak bisa di,

F- PG (Drs. HAMKA BACO KADY, MS):

Pak Ketua,

Sambil menunggu Pak Menteri, barangkali, mumpung ada Pak Sekjen dan Eselon I. Menjadi catatan ini Pak Sekjen dan Pak Dirjen, apa yang tertera dalam buku ini, hanya kan volume, misalnya Jenepono BUMDes 5 unit. Maksud saya nanti, penjabarannya itu nama-nama 5 unit itu harus berasal dari anggota. Jangan sampai berbeda, ya Pak ya? Itu harus menjadi kesepakatan nanti Pak. Sama halnya dengan modal usaha. Ada berapa unit, misalnya di Takalar, modal usaha itu nanti disepakati bersama dan lokasinya seperti apa. Saya pikir begitu.

Lanjut, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke, kita lanjut ya? Kita cabut skorsnya, Pak Henky silakan.

(SKORS RAPAT DICABUT)

F- PDIP (Drs. HENKY KURNIADI, S.H.,M.H.):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rekan-rekan Komisi V yang saya hormati,

Bapak Menteri beserta jajarannya yang saya hormati.

Kalau saya melihat trend Pak, ketika Bapak pertama kali memegang di Kementerian Desa, saya mengingat dulu penuh dengan kritik. Kalau saya melihat sudah berjalan setahun lebih ini, saya melihat perkembangannya itu sudah positif. Jadi saya mengapresiasi, karena perkembangannya kalau dulu Bapak diragukan sebagai orang baru di Kementerian Desa, pasti memasuki hutan belantara yang Bapak tidak tahu bagaimana, berapa macannya, berapa buayanya, tiba-tiba masuk ke Kementerian seperti ini, menurut saya agak repot. Ternyata Bapak bisa *survive*. Dan saya melihat dari beberapa program yang sudah turun itu sudah positif, walaupun pedesaan ini diserang dari berbagai pihak, dari berbagai kementerian, dari PUPR, jadi bukan hanya dari Kemendes. Dan salah satu efek positif yang bisa saya sebut misalnya, saya dapat pengaduan dari kontraktor yang menengah atau yang biasa mendapat proyek-proyek yang cukup lumayan misalnya di Riau, di Papua, yaitu kesulitan mencari tukang. Karena ternyata di pedesaan itu tukang-tukang digunakan. Jadi kalau jaman dulu mencari tukang lebih mudah, kalau sekarang mencari tukang itu lebih sulit Pak, karena di desa-desa itu banyak pekerjaan. Tukang-tukang itu sudah jual mahal, karena sudah punya pekerjaannya sendiri di desa. Ini artinya positif untuk kegiatan di desa. Ini salah satu perkembangan baik.

Lalu dari pengalaman saya bersama Kemendes, kalau pelatihan ini sangat penting, Pak. Karena jaman sekarang ini sulit mencari penggerak-penggerak desa, karena penggerak desa itu bukan hanya bayaran, tapi juga setengah pekerja sosial. Ini sangat positif kita menciptakan pekerja-pekerja sosial di pedesaan itu sangat penting disini. Karena itu perlu lebih digalakkan. Karena selama 5 hari itu pelatihan cukup intensif dan sangat positif untuk kesadaran bersama di warga masyarakat. Warga masyarakat timbul keguyuban, timbul suatu kesadaran baru perlunya membangun desa. Ini arti pentingnya.

Kemudian kalau tadi rekan saya Pak John Mirin di Papua itu ada daerah-daerah tertinggal, kemudian di Pulau Jawa sendiri sebenarnya ada seperti di Badui dan lain sebagainya, itu daerah yang *under develop region* yang perlu sentuhan-sentuhan pembangunan disana. Tetapi itu perlu berhati-hati, karena kita itu perlu suku-suku yang seperti itu, keasliannya itu perlu kita rawat, sama seperti kalau hutan itu daerah hutan yang alami, hutan yang ini, perlu, jangan sampai dirusak. Jadi suku-suku seperti Suku Badui, suku-suku yang banyak berada di Papua itu keasliannya itu jangan sampai rusak, dengan adanya pembangunan. Jadi pembangunan ini yang penting pendidikan mereka juga dibaguskan, tadi ada rumah diatas pohon, ini sama sekali belum tersentuh, saya pikir ini perlu dimasukkan.

Jadi saya sudah melihat suatu trend positif, ke depannya saya menunggu dari Pak Eko, gebrakan yang pemikiran *out of the box* ya, karena semua kementerian itu pada hakekatnya menteri itu adalah CEO dari sebuah institusi, semua menampilkan kehebatan-kehebatannya. Saya melihat selama ini yang paling menonjol Pak Basuki, karena Pak Basuki ini sangat menonjol sekali. Saya mengharapkan juga justru dari Pak Eko ada suatu pemikiran *out of the box*. Dua hari yang lalu Menteri Perhubungan mengeluarkan suatu daya kreatifnya sehingga membuat program yang tidak semata-mata mengandalkan APBN, tetapi bisa mencari, mengcreate sumber pendanaan baru yang tidak tergantung oleh APBN. Ini bagus Pak. Kalau dulu zamannya Pak Ahok, saya tidak membela Pak Ahok ya, itu lepas dari pro kontra. Khusus yang masalah jembatan berputar yang di dekat Semanggi itu, ini menurut saya pemikiran yang *out of the box*, pemikiran yang tidak pernah dipikirkan yang lain tapi tercipta seperti itu dan diluar APBD. Nah inilah salah satu contoh pemikiran *out of the box*. Jadi dua hari yang lalu sudah dimulai oleh Menteri Perhubungan, saya berharap dari Bapak ada suatu pemikiran-pemikiran baru, sehingga trendnya itu dari tahun ke tahun mengarah ke hal-hal positif. Saya pasti mendukung kalau semua itu, hal-hal yang seperti ini, positif. Saya terus-terang mengapresiasi apa yang sudah berbeda dengan setahun yang lalu.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Selanjutnya yang terakhir, paling terakhir, tadi terakhir Pak Henky, ini yang paling akhir.

F- PD (WILLEM WANDIK, S.Sos):

Pak Ketua,

Dari saya ada.

KETUA RAPAT:

Oh jadi ini yang paling akhir, ini yang paling akhir lagi, Pak Willem ya? Dari Pak Rahmat Hamka, setelah itu dari meja pimpinan ada satu.

Baik, silakan Pak Rahmat, waktunya. Pak Willem siap-siap.

F- PDIP (Dr. H. RAHMAT NASUTION HAMKA, S.H., M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Langsung saja, mengingat waktu, satu menit saja.

Yang pertama Pak Menteri, saya ingin menyampaikan apresiasi tentang pelaksanaan Dana Desa. Tapi yang mungkin yang lebih terpenting, kami berharap agar Dana Desa itu dapat terlaksana dengan baik, maka para kepala desa juga harus diberikan ruang, agar nantinya dapat melaksanakan ini dengan sedikit lebih kreatif, tapi tetap dalam batas-batas tertentu. Jadi saya tidak sepakat kalau dibilang kaku, belum kaku, dan sudah kaku juga begitu. Kadang-kadang kepala desa juga kesulitan untuk melakukan sesuai apa yang diinginkan, begitu. Tapi saya hanya ingin begini saja, dalam penegakkan hukumnya, tolong para kepala desa itu jangan banyak instansi yang ikut terlibat, cawe-cawe, polisi masuk, jaksa masuk, ini juga KPK

katanya mau ikut-ikutan juga masuk. Nah coba kalau bisa ada SOP, bahwa untuk internal dululah. Kalau ada terjadi hal apapun, itu internal saja, tidak boleh ada. Ini kadang-kadang inspektorat belum selesai, polisi sudah duluan, ke Jaksa mau juga, begitu. Jadi akhirnya apa? Kadang Inspektorat lihat polisi takut juga, lihat jaksa juga kadang ngeper juga, jadi mohon Pak Menteri, kalau bisa dibuat sajalah split, apakah dengan Keppres atau Perpres atau apa, begitu, tolong internal dulu. internal tidak selesai, baru internal melimpahkan, baru boleh jalan itu. Ini jangan Inspektorat belum selesai, tentang api sudah dikejar-kejar yang lain, dihantu-hantui lagi. Nah Inspektorat juga mau tidak bisa berdaya, karena apa? Karena menghadapi polisi, menghadapi kejaksaan, begitu. Kadang-kadang ini menjadi beban bagi kepala desa untuk melakukan ini.

Jadi maksud kita, ini mohon agar mendapat perhatian Pak Menteri, supaya ini aspirasi-aspirasi kepala-kepala desa ini. Tapi bukan berarti mereka ingin nakal, tidak. Cuma minimal dalam bekerja itu tenang, kalau ada salah sedikit, minta dibetulkan, begitu. Tapi tidak dicari-cari salahnya. Itu yang pertama.

Yang kedua adalah mengenai mobilangkutan pedesaan, Pak Menteri. Pak Jokowi kemarin pada saat pameran mobil di Tangerang dan lain sebagainya itu kan sudah ada prototipenya dan juga bisa diproduksi massal, begitu. Ya apakah tidak bisa *pilot project* dululah, mungkin berapa begitu, untuk mobil angkutan pedesaan, seperti apa, dalam rangka membantu. Karena multiguna. Mobil angkutan pedesaan itu multiguna, karena saya ikut lihat juga di pameran, dia bisa berfungsi menjadi angkutan pedesaan, bisa ditaruh juga menjadi perontok padi, kalau dipasang ininya, karena alat, mesin apa namanya, mesin motornya itu bisa menggerakkan. Lalu kemudian juga bisa menjadi pompa air. Jadi maksud saya, harganya pun tidak begitu mahal, begitu. Ya kalau kita Rp100 juta paling mahal, kalau tidak, salah juga begitu. Jadi kalau ada pilot projectlah, beberapa anggota ini di dapilnya, inilah dululah, ... jadi saya pikir juga bisa dimulai Pak. Dan juga menggairahkan ekonomi otomatis industry dalam negeri juga, karena TKDNnya sangat tinggi juga.

Saya pikir itu Pak Menteri, usulan kongkrit saya, mudah-mudahan bisa diakomodir. Ya tidak perlu dulu masal, tapi mungkin beberapa, sehingga perusahaan otomatis yang membuat prototype itu juga semangat mengembangkannya.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Willem.

F- PD (WILLEM WANDIK, S.Sos):

Baik, terima kasih Pak Ketua.

Memang saya melihat peran Kementerian Desa sangat penting dan krusial dalam mewujudkan agenda Nawacita dengan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2015-2019, khususnya pembangunan daerah pinggiran atau daerah tertinggal, perbatasan, dan transmigrasi. Oleh karena itu kami melihat pagu belanja Kementerian Desa PDT yang mencapai Rp4,32 triliun, ini harus benar-benar menjawab kebutuhan pengembangan potensi masyarakat desa. Dimana kami melihat memang kami memberikan apresiasi dimana program-program dari Kementerian Desa ini benar-benar sentuhan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, akan tetapi juga perlu ada pengawasan yang benar-benar didukung oleh aturan, sehingga seperti halnya beberapa hal yang telah disampaikan oleh teman-teman terdahulu saya tadi, itu tidak terjadi. Dimana terlihat adanya interupsi dari institusi lain ya ini perlu dibuat suatu aturan, supaya ada pengamanan. Walaupun kami tidak membatasi diri, tapi setidaknya-tidaknya perlu ada aturan, baik dalam melakukan pendampingan Dana Desa dan juga program-program, tentunya ini ada aturan yang perlu memberikan sebagai payung hukum, supaya tidak bias. Ini sesungguhnya ada hal sebenarnya bisa diselesaikan secara internal, dibawah pengawasan kementerian langsung, tapi karena ini langsung bisa diintervensi oleh institusi lain. Misalnya seperti yang disampaikan oleh saudara saya tadi di Kalimantan.

Yang kedua, kami melihat disini masih banyak kabupaten tertinggal, dari 122 kabupaten tertinggal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, itu dimana 32 kabupatennya berada di daerah Papua, baik Provinsi Papua maupun Papua Barat. Oleh karena itu tentunya dalam mendukung percepatan pemberdayaan masyarakat dan juga Kementerian Masyarakat Desa, tentunya menjadi prioritas dan perlu dilakukan, mungkin perlu memfilter program-program yang diinput itu harus difilter, apakah benar-benar itu masuk kriteria tidak. Kriteria yang disebut dengan daerah tertinggal, daerah terbelakang, apa namanya, terisolasi, terluar, perbatasan, apakah ini masuk kriteria atau tidak. Ini mesti harus dilihat. Jangan sampai kita tetapkan daerah, itu ternyata bukan masuk kategori daerah tertinggal, atau bukan daerah perbatasan, atau daerah terisolasi. Karena ada sejumlah daerah yang kami lihat disini, sebenarnya dia tidak masuk kategori itu, di dalam beberapa provinsi bahkan desa atau kabupaten yang telah dimuat disini, sebenarnya kami lihat, tidak masuk dalam kategori daerah tertinggal, daerah terluar dan juga daerah perbatasan.

Dan juga kami berharap supaya perlu dilakukan secara berhati-hati dalam penetapan 80 calon kabupaten yang akan diteruskan dari ketertinggalan khususnya kabupaten yang ada di Papua, dilihat dari kondisi geografis dan juga kondisi aspek geografis dan juga aspek sosio kultural disana, dan ini juga menjadi suatu hambatan tersendiri dalam penyelenggaraan praktek kita bernegara maupun juga dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan juga dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Papua, dimana saat mulai pelaksanaan program-program, proyek-proyek di tanah Papua kebanyakan juga tersendat, tidak bisa mempengaruhi serapan anggaran karena benturan dengan aspek kultural juga aspek geografis, tantangan alam disana, banyak jalan yang tidak terhubung, tidak terkoneksi antara satu desa dengan desa, antara kabupaten ke desa atau kecamatan sehingga kadang itu menjadi hambatan utama. Misalnya dalam termin pertama atau termin kedua, atau masuk ke termin ketiga, banyak program-program di Papua itu tidak bisa terserap, karena itu, dihadapkan pada hambatan geografis dan juga hambatan kultural. Tentu harapan kami ini menjadi perhatian sendiri dan harus perlu lakukan kajian. Kalau tidak demikian, maka kita akan dikalahkan.

Yang berikut, kami harap juga dari pencapaian 2500 desa mandiri, dan 5000 desa berkembang dan 80 daerah tertinggal yang ter... itu, harus diidentifikasi berapa kontribusi program dan kegiatan dari kementerian/lembaga yang ada di Kementerian Desa. Dan kami harap nanti pada saat pertemuan dengan Eselon I mungkin kami akan sampaikan secara detail.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, Pak Willem, menjadi yang terakhir dari meja anggota, Pak Menteri, ada satu dari kami di meja pimpinan, silakan kepada Pak Ibnu Munzir untuk menyampaikan.

PIMPINAN KOMISI V (F-PG/Drs. H. IBNU MUNZIR):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati,

Tadi saya sengaja mengambil gambar Pak, untuk Pak Menteri dan jajaran dan seluruh kawan-kawan, saya sengaja photo tadi. Maksud saya dengan satu doa bahwa 2019 ke depan, di ujung-ujung, diatas Agustus, September, kita dalam posisi masih seperti ini, ketemu lagi. Artinya, bahwa dalam sinergitas kita, kita menyampaikan berbagai program dan kemudian Pak Menteri juga melaksanakan program-program itu untuk kepentingan rakyat, itu terkait dengan apa yang diperjuangkan anggota. Sehingga rakyat di daerah pemilihan masing-masing merasa penting artinya kehadiran masing-masing anggota ini untuk tetap terpilih kembali ke Senayan. Itu harapan, saya kira. Dan untuk itu saya apresiasi, tadi sebelum kita lanjut, kita ngobrol di depan, Pak Sekjen, dan datang Pak Menteri tadi dan juga Perencanaan, bahwa apa yang menjadi program kita disini yang sudah disodorkan oleh Pak Menteri bisa kita sesuaikan dengan lokasi yang kita tunjuk yang terkait dengan dapil masing-masing. Saya kira itu patut kita apresiasi, karena memang juga toh yang disebutkan disini baru provinsinya kemudian mungkin nama kabupatennya. Sehingga ke bawah, detailnya, kecuali daerah-daerah seperti yang diajukan teman-teman, saya kira memang perlu penyesuaian lebih jauh lagi. Untuk itu, bagi saya, saya kira ini sangat memadai dalam upaya kita secara bersinergi di awal ini untuk kepentingan masyarakat kita di bawah.

Nah sekedar koreksi saja, saya kira ini salah ketik tadi di Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa di point 220 itu, nomor 220 itu maksud saya, disebutkan Sulawesi Barat, tapi menyebutkan kabupatennya Malaka. Nah ini saya pikir, Kab. Malaka dimana ini? Karena setahu saya tidak ada itu di wilayah Sulawesi Barat. Mungkin Mamasa barangkali ya? Karena diatasnya kan ada Mamasa, berarti itu salah ketik, saya menduga. Tapi paling tidak, jangan pula karena salah ketik lalu disebut tidak ada itu dihilangkan, karena itu berarti kerugian buat daerah pemilihan.

Nah selanjutnya memang Sulbar ini sebagai provinsi baru, juga dulu daerah transmigrasi. Dulu ada program KTM saya tidak tahu berhenti, apa masalahnya. Tapi itu menjadi pertimbangan nanti. Tapi ada beberapa program yang memang menjadi usulan yang saya lihat diakomodasi, tapi tidak ada salahnya saya kira usulan dari Pemerintah daerahnya saya serahkan menjadi satu acuan untuk kita sesuaikan secara bersama-sama.

Saya kira hanya ini point yang, karena substansi kan sudah kita bahas lebih jauh, sudah banyak dan penyerahan di daerah juga kita lihat dari kunspek-kunspek yang kita lakukan, dan itu hasilnya bagus. Saya malah menyaksikan di Metro TV, Pak Menteri dan jajaran dengan beberapa desa-desa yang dianggap terjadi inovasi yang luar biasa, dan itu semua sesuatu yang tidak diduga, dan ini hal-hal yang sangat positif bagi pengembangan masyarakat kita di seluruh Indonesia.

Pak, iijinkan saya menyerahkan ini kepada Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Sebagai tambahan informasi, doanya Pak Ibnu Munzir, makbul Insha Allah ini, karena baru haji, masih didampingi oleh 40 malaikat, Pak.

Oke, terima kasih.

Pak Menteri,

Saya juga harus kasih apresiasi ini, dari 25 anggota yang tanda tangan, kemudian dari yang mengikuti terus sampai akhir 21 anggota, 18 anggota diantaranya memberikan pertanyaan, artinya perhatian dan atensi dari teman-teman anggota Komisi V kepada Bapak rupanya sudah sedemikian besar ya? Dan saya perhatikan, waktu juga cepat, termasuk sampai dengan jam 16.00 WIB ini kita baru 2 jam, 3 jam nanti jam 16.20 WIB, Pak Menteri. Biasanya kalau dipimpin Pak Fachri kan sampai jam 22.00 WIB biasanya. Termasuk cepat ini.

Dan beberapa yang Bapak sudah sampaikan saya kira mudah dicerna oleh teman-teman, tinggal kita ikuti nanti locus dan apa namanya, program yang ada disitu.

Saya persilakan Pak Menteri untuk menjawab 18 pertanyaan anggota, Cuma karena Magrib ini kan pendek ya, saya usul saja, bagaimana kalau jawaban panjangnya nanti tertulis. Pak Menteri bisa slide-slidennya saja, karena kita sudah masuk waktu Magrib ini. Nanti kita ketinggalan lagi jadwal untuk yang lainnya. Saya kira itu.

Silakan kalau ada Pak Menteri, yang bisa dijawab secara tertulis, nanti di tertulis saja.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI:

Terima kasih Pimpinan.

Jadi mengenai locus. Ini mengenai locus itu pada dasarnya saya sudah meminta kepada Sekjen dan seluruh Dirjen saya, untuk koordinasi dengan seluruh anggota Komisi V. Saya pikir dibawah TA-TA nya sudah ada. Tapi juga saya minta *proactiveness* dari teman-teman daerah di Komisi V,

begitu, karena juga mesti harus ada *time tablenya*, Pak. Karena kalau *time tablenya* lewat, kayak tahun lalu itu, jadi banyak anggarannya akhirnya tidak terserap Pak, jadi sayang. Jadi nanti ditentukan saja *time tablenya* untuk itu sampai kapan, jadi pada saat itu kalau perlu sudah bisa pra DIPA juga, jadi bisa lebih enak, untuk memastikan penyerapannya bisa maksimal.

Kedua kali juga memang kita juga ada locus-locus yang sudah ditentukan oleh Bappenas Pak, karena itu bagian dari program multi kementerian. Penanganan *stunting* ditentukan di 100 kabupaten di 1000 desa. Nah itu karena dikeroyok dengan kementerian lain, mau tidak mau kita partisipasi. Nah tentunya kalau ada itu yang masuk di dapilnya, ini nanti kita inform juga, tapi itu memang tidak bisa diganggu. Dan ada program-program misalnya kayak di NTT, kenapa banyak? Karena NTT sudah lama tertinggal, kemudian dibangun bendungan, jadi kita masih menyesuaikan apa namanya, di daerah bendungan itu mesti maksimal karena bagian dari program yang harus diafirmasi.

Nah banyak juga Pak, jadi usulan-usulan yang saya dapat masukan dari staf saya, tidak didukung dengan dokumen yang lengkap. Jadi karena dokumennya tidak lengkap, jadi tidak bisa di *follow up*. Jadi mohon komunikasinya lebih diintensifkan, agar dalam masa *dead line* itu dokumennya benar-benar dilengkapi, sehingga benar-benar usulan itu bisa dijalankan Pak. Kayak tahun lalu saja ada beberapa ribu BUMDes yang tidak terserap, padahal sudah dialokasikan, itu karena dokumennya tidak lengkap.

Kemudian juga kadang-kadang tidak jarang ada antara tarik-menarik antara anggota komisi dengan kabupaten. Nah itu saya minta diselesaikan oleh anggota komisinya lah, supaya jangan, ini sudah ditentukan locusnya sama anggota komisi, kabupatennya menolak. Akhirnya tidak bisa jalan karena nanti akhirnya tanahnya tidak disediakan atau apanya yang tidak disediakan. Nah itu saya pikir perlu komunikasi yang lebih intensif.

Kemudian pengawasan Dana Desa. Pengawasan Dana Desa ini memang satu dilemma yang luar biasa, Pak. jadi di tahun 2015 pada saat ini pertama kali di *launching*, itu tidak ada hari tanpa persoalan Dana Desa, Pak. Karena desa kita jumlahnya ada 74.957 desa, kalau 1 desa yang bermasalah saja sudah 1% saja, itu sudah hampir 750 desa, Pak. Cukup untuk memenuhi koran 1 hari dua kali lho Pak. Saya sampai mikir, waktu itu, tidak salah ini jadi Menteri Desa ini, tiap hari soal Dana Desa, Pak.

Tapi Pak, pelan-pelan kita perbaiki. Dan juga kita juga tidak bisa melihat, persoalan itu tidak seluruhnya karena korupsi juga, ada yang bilang banyak masalah, karena 60% dari kepala desa kita Cuma tamatan SD dan SMP, Pak. Jadi banyak merencanakan itu juga tidak mampu, walaupun diajarkan. Contohnya bikin jalan 100 m, mungkin biayanya katakanlah Rp10 juta, karena tidak detail,

F- PD (WILLEM WANDIK, S.Sos):

Interupsi, Pak Ketua, interupsi.

Interupsi sedikit saja, mau tambahkan sedikit saja apa yang disampaikan Pak Menteri tadi.

Memang benar di Papua itu sejumlah kabupaten memang kepala desanya itu tidak berpendidikan, tidak bisa membaca dan menulis. Makanya pertemuan-pertemuan tahun-tahun lalu selalu saya sampaikan bahwa tenaga-tenaga pendamping desa itu harus benar-benar, selain SDMnya kuat, sudah pasti SDM nya bagus, setelah itu juga harus melibatkan rekrut orang-orang daerah yang tahu bahasa, tahu jalan disana, tahu adat, itu. Jadi makanya untuk pendekatan Papua memang beda. Selalu tidak bisa penyamaan definisi, dalam praktek kita bernegara di Republik ini, tidak bisa. Jadi di Papua itu kalau bisa harus menggunakan pendekatan aspek lokal, *wisdom localnya* harus digunakan. Baik, kalau bisa itu harus dibawa juga dalam pembahasan RUU sektoral, mestinya ini harus masuk, sehingga tidak terjadi penyamaan definisi dan diperlakukan sama se-Indonesia. Akhirnya makanya tidak akan pernah menyentuh itu Papua, tidak akan pernah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Menteri.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI:

Terima kasih Pak Willem.

Jadi Pak Ketua, jadi apa namanya, banyak seperti tadi saya katakan, perencanaan harusnya 100 m Rp10 juta tapi karena tidak detail, ternyata jumlah material yang dibutuhkan berbeda, jumlah itu, akhirnya menjadi Rp15 juta. Padahal tidak ada korupsi Pak. Benar-benar dipakai untuk bikin jalan sampai selesai, tapi perencanaannya kurang detail karena faktor-faktor tak terduganya tidak dihitung. Nah itu menjadi temuan di masa lalu. Satu tahun itu bisa ada 12 ribu laporan, waktu itu, awal-awalnya.

Juga misalnya soal pajak. Desa diwajibkan untuk membayar pajak. Padahal toko-toko material yang ada di desa tidak ada faktor pajaknya,

misalnya beli semen Rp100 ribu, harus bayar PPN Rp110 ribu, sementara fakturnya Cuma Rp100 ribu. Nah mau tidak mau dia kan harus bikin faktur sendiri kan untuk sebagai buktinya. Nah itu masuk bukan sebagai, itu persoalan-persoalan kayak begitu banyak Pak. Makanya kita libatkan, kita membuat MOU dengan Kepolisian dan Kejaksaan dan Kementerian Dalam Negeri, karena tugas pengawasan itu ada di Pemerintah daerah Pak, sebetulnya. Bukan di Kementerian Desa. Karena yang punya pengawasan itu di Kementerian Desa, eh Pemerintah Daerah, melalui Dinas PPMDnya atau Inspektorat kabupaten.

Nah kalau tugas penegak hukum memang, ada atau tidak ada memang untuk mencegah terjadinya persoalan-persoalan yang menyangkut korupsi dan criminal. Nah akhirnya untuk mencegah itu kita mengadakan MOU, jadi di dalam MOU itu disepakati, selama tidak ada unsur korupsi Pak, ini Pak Anton terutama, yang telepon saya Pak, itu kepala desa tidak boleh dikriminalisasi. Jadi polisi akan mengadakan pembimbingan, Pak. **Nah ini kesepakatannya ya Pak ya, nanti akan saya jelaskan.** Dan Kapolri pada waktu ... Kepolisian, aparat Kepolisian yang main-main sama Dana Desa, itu bukan hanya akan diberhentikan, tapi akan dipidanakan dan atasan langsungnya akan ... nah ini sudah ada 2 kasus, jadi Polisi benar-benar ...

Bahwa kenyataannya di lapangan mungkin ada, kita memfasilitasi juga Pak, dengan adanya satgas Dana Desa. Itu kita punya nomor hotline, 1500040, didalamnya ada unsur Kementerian Dalam Negeri, ada Kepolisian, ada Kejaksaan, jadi kalau ada misalnya kepala desa yang dikriminalisasi, kita pada waktu 3 x 24 jam kalau datanya lengkap Pak, kita kirim. Daerah Simalungun, Sumatera Utara, ... banyak Pak, itu kita sudah sering adakan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh ... Papua, ... yang kita kirim untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dan advokasi. Tapi kalau korupsi memang kita tidak bisa apa-apa, ini harus masuk ke ranah hukum.

F- PDIP (Dr. H. RAHMAT NASUTION HAMKA, S.H., M.Si):

Interupsi Pimpinan, sedikit saja.

Ijin ya, maksud saya begini Bapak, kadang-kadang itu persepsi yang seperti itu, di bawah itu masing-masing persepsinya. Polisi persepsi sendiri, Jaksa persepsi sendiri. Nah maksud saya begini, bahwa pembinaan itu *clear* dulu di Inspektorat, begitu lho. Kalau Inspektorat sudah mengatakan ini dilimpahkan kepada polisi dan jaksa, baru boleh itu. Jadi supaya *secret*, satu pintu, kita. Kalau tidak, Inspektorat belum apa-apa, belum ini, persepsi polisi, ini sudah nyindir, korupsi ini. Kan jadi kadang-kadang Inspektorat ngeper, jadi maksud saya itu, Pak Menteri, kita ini oke, tidak ada masalah, pelibatan polisi, jaksa itu dalam ... tapi kadang-kadang itu mohon maaf, kalau kita tidak bikin

aturan tegas, Inspektorat juga kan nanti akan melihat, kalau memang sudah indikasi pidana, dia serahkan, begitu. Tapi kalau tidak ini, persepsinya sudah ada korupsi, itu pidana, ya sudah, dikembangkan, sudah. Jadi itu maksud saya, Pak Menteri, mohon ijin saja.

Terima kasih.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI:

Terima kasih Pak.

Kalau boleh karena ini menjelang Magrib, saya tidak di, supaya saya bisa menyelesaikan, nanti kalau mau itu, kalau tidak, nanti tidak tuntas.

Jadi begini Pak, di daerah itu, sebetulnya bupati, kepala daerah itu, ... ketua .. sebagai Ketua Forkompinda itu juga membawahi ... nah kita selalu sosialisasikan supaya ...dibawah koordinasi bupati, sehingga tidak Inspektorat mengaudit sendiri, polisi mengaudit sendiri, jaksa mengaudit sendiri, jadi akhirnya kepala desa tidak kerja. Nah itu, jadi tolong kalau ada yang itu belum jalan di kabupaten, dikasih ke kita, nanti ... juga bisa menasehati bupatinya, ... bersama-sama dengan bapak, ... mengadakan penyuluhan ke siapa yang diperlukan. Dan itu kita lakukan hampir setiap hari ... ke nomor 1500040, kalau Bapak bisa WA saya langsung, saya kirim ... yang WA saya, ...

Kemudian ... efektif Pak, (*rekaman tidak jelas*), karena Dana Desa dibagi 3 tahap, kalau tahap berikutnya ... belum selesai, laporannya ... dengan ... tahun lalu sudah ... masukan-masukan dari Bapak-Bapak, bantuan dari Bapak-Bapak, untuk ikut mengawasi, ikut mendampingi, karena NGO juga banyak Pak, kita banyak NGO yang kita tangkap juga. Karena juga kepala daerahnya juga yang membuat Dana Desa itu jadi cair, dan ... KPK tidak bisa masuk ke desa. Karena aturannya ... KPK hanya bisa masuk ke penyelenggara negara, dalam hal ini hanya ke level bupati. Jadi tidak mungkinlah KPK masuk sampai ke, tapi KPK banyak memberi masukan ke kita yang masukannya baik, itu masukannya kita pelajari dan kita jalankan, karena masukannya juga baik.

Kemudian mengenai Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa ini, kita juga *struggling* Pak, awal-awalnya kita itu BUMDes juga banyak yang tidak setuju Pak, karena tidak semua desa pada waktu itu, juga belum ada BUMDes yang sukses. Kita dibenturkan dengan koperasi, padahal ini dua hal yang berbeda sebetulnya, yang sekarang kita BUMDes sudah sinergi dengan koperasi. Juga tidak semua desa mempunyai orang yang mampu mengelola kegiatan usaha seperti ini. Nah jadi yang kita lakukan adalah sekarang sudah

ada 30 ribu lebih BUMDes ya, tapi yang benar-benar membukukan keuntungan itu baru diatas 10 ribu sedikit saja. Nah sekarang kita percepat dengan mengerjakan kerja sama dengan swasta dan BUMN. Ini Bank BNI setiap tahun mengadakan pelatihan BUMDes 1500, tapi itu kurang, karena jumlah desa hampir 75 ribu. Kalau kapasitas ... 500, butuh 50 tahun untuk bisa melatih semuanya. Nah jadi kita dengan swasta, lah. Jadi kita misalnya dengan Salim, Indogrosir, misalnya kita BUMDes untuk retail, begitu, jadi mereka bantu kasih managemennya, kasih sistemnya, kasih itunya, *at the same time* bisa dapat karena skalanya besar, bisa dapat *cost* yang lebih murah, jadi menjawab pertanyaan Bapak siapa tadi, itu bisa mengurangi mata rantai sehingga harga-harga di desa bisa lebih murah dan BUMDes bisa memperoleh keuntungan dari usaha retail itu, dan BUMDes nya bisa membantu koperasi-koperasi supaya koperasi juga bisa hidup.

Jadi retailnya, kita juga mengadakan dengan BRI, BNI, bersama dengan Lion Parcel misalnya, karena produk-produk hortikultura itu rata-rata dari petani sampai ke kota, itu bedanya harganya 3 kali lipat, Pak. Misalnya harga cabe Rp10 ribu di level petani, harus dikumpulkan pengumpul kecil, pengumpul besar, kayak pasar induk, dan pedagang besar, pedagang kecil, sampai *end user*, itu bedanya bisa 3 kali lipat. Nah kita bersama BUMDesnya, bersama Lion Parcel dan BRI dan BNI, mereka bantu sistem, bantu sistem itunya juga, jadi misalnya *packagingnya*, *packaging* cabe ½ kilo, ½ kilo, cabe harganya Rp10 ribu di level petani dibeli Rp15 ribu, jadi petaninya lebih untung Rp5 ribu, terus BUMDesnya untung Rp5 ribu dengan *packaging* dan lain-lain sebagainya. Kemudian biaya pengirimannya itu rata-rata dari desa ke kota itu *one day delivery* itu Rp5 ribu, sehingga sampai di *end user* bukan Rp30 ribu tapi Rp25 ribu. Tapi disitu dapat untung Rp5 ribu, ... di *end user* bisa Rp... nah itu kita model-model itu bisa ... Kita bersama dengan Exxon Mobil dan Indo Mobil membuat gerai-gerai pakai container 20 feet, nah itu Bapak-Bapak juga bisa mengusulkan ke kita Pak, tapi minimum dalam satu locus itu 50 ... supaya ada itunya, kayak model retail, kayak model kayak pompa-pompa bensin itu. Dengan Exxon Mobil, dengan Indo Mobil. Sekarang juga Pertamina mulai ikut dengan begitu juga Pertamina mau ikut. Satu container 20 feet isinya ada 2 *fueling station*, buat bensin motor Pak. bukan Pertamina, Pertamina itu illegal, karena Pertamina itu tidak dapat ijin, dan keamanannya tidak ini, karena mereka belinya pakai motor, motornya ngisi bensin, dari tanki bensin di ... jadi kita juga tidak mau itu. Kita pakai standar yang ditentukan oleh Exxon, pakai container 20 feet, itu dengan model kerja sama konsinyasi, mereka Cuma modal kerjanya Rp40 juta dari BUMDes Rp10 juta, 8 bulan itu dijamin balik. Jualan aki, jualan spare part, jualan bank. Terus sekarang baru mulai di Purwakarta, sama di Pandeglang lagi dibikin. Daerah lain yang kalau yang mau itu, monggo diusulkan. Pertamina juga sudah mulai masuk ini, sekarang kita lagi bicara bisnis modelnya dengan Pertamina. Dengan konsep yang sama, Pertamina malah modulnya lebih

banyak. Nah ini yang untuk mempercepat pertumbuhan BUMDes-BUMDes. Kita juga kerja sama dengan swasta, misalnya dalam program Prokades, kayak di Pandeglang, Pandeglang kita menanam jagung sekitar 50 ribu ha, sekarang sudah 54 ribu ha. Nah itu perannya BUMDes adalah sebagai pemipil sama pengumpul, sebelum sampai ke perusahaan *off takemya*. Jadi BUMDes juga dapat pendampingan. Karena walaupun kan Cuma mipil jagung, ... itu juga tidak sembarangan, Pak. Karena kalau prosesnya tidak cepat, kalau ... naik, akhirnya jadi ... Nah dengan adanya perusahaan yang menjadi *off takemya*, perusahaan itu memberikan ... karena kita juga tidak punya tim untuk memberikan pendampingan yang teknisnya sangat spesifik seperti itu. Jadi kita libatkan dunia usaha. Tahun ini kita sudah berhasil menghubungkan 128 bupati dengan 48 perusahaan, menjadi 200 kesepakatan usaha, itu ada Rp47 triliun investment pasca panen di desa-desa dan Rp16 triliun pasca panen di kawasan pedesaan, termasuk 1 dari Korea. Ada 2 dari Korea, yang 1 di pertanian, yang 1 di pariwisata. Jadi itu cara kita untuk mempercepat BUMDes, Pak.

Mengenai daerah tertinggal, itu sudah ada kriterianya, Pak. Setiap daerah itu mesti ada atau desa tertinggal mesti berapa ada sekolahnya atau tidak, pendapatannya berapa, itu kita bisa kasih detailnya dan itu setiap 5 tahun di ... dan itu ditentukan dalam suatu Inpres.

Kemudian, nah ini yang saya masih agak frustrasi, koordinasi kunjungan. Saya juga setiap kunjungan sudah saya pastikan bahwa Komisi V dilibatkan, atau mungkin dibikin jadwal kunjungan Komisi V saja Pak. Jadi kita yang menyesuaikan waktunya, sehingga apa namanya, tapi kalau sekarang yang itu kan, kalau yang apa namanya, Reses ya. Reses itu kan kita diminta mendampingi. Nah sekarang yang kaitan itu kalau bisa dibikin jadwal kunjungan, sehingga program kita

KETUA RAPAT:

Pak Menteri,

Saya potong saja Pak.

Pak Menteri sudah punya jadwal kunjungan ke daerah-daerah. Itu saat kunjungan ke daerah, ke daerah mana, Pak Sekjen tinggal informasi Pak ke anggota DPR, bikin surat untuk bisa bersama-sama dengan Pak Menteri. Itu satu.

Yang kedua memang, bisa kalau kita punya kunjungan kerja ke komisi ... kita itu kan terbatas waktunya. Kita menyesuaikan Pak Menteri saja, punya

jadwal, kita. Itu Pak, kalau itu jalan, sebenarnya bisa ini Pak, teman-teman anggota tinggal siap dapat undangan, menyesuaikan jadwalnya Pak Menteri.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI:

Ya Pak, jadi nanti saya minta Pak Sekjen begitu lagi. Karena saya selalu minta sebetulnya Pak. Tapi *somehow* pasti waktunya tidak cocok, atau bagaimana. Kadang hadir, kadang tidak. Jadi mungkin perlu dicarikan satu koordinasi yang lebih baiklah, supaya tidak mubazir. Tapi intinya saya *open*.

F- PKS (NURHASAN ZAIDI, S.Sos):

Tidak, interupsi sedikit.

Maksudnya praktis saja, betul kata Pak Ketua. Praktis saja Pak Menteri, informasikan, kalau kita ada waktu, kalau tidak ada waktu ya Pak Menteri tetap jalan. Tidak usah kita tidak bisa, Pak Menteri tidak, karena ini tugas Pak Menteri kan lebih luar biasa. Kita adaptasi ke Pak Menteri.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI:

Karena program kita tidak terlalu banyak, Pak. Kalau sampai banyak yang tidak ikut, nanti ujung-ujungnya jadi tidak bisa itu Pak. Jadi sebisa mungkin kalau bisa efektif, ada Komisi V-nya. Coba nanti komunikasi lagi.

Mengenai pendamping desa, Pak. Pendamping desa juga di masa yang lalu, pendamping desa di masa yang lalu itu direkrut oleh Kementerian Desa, banyak masalah. Jadi waktu saya jadi menteri, saya lemparkan ke provinsi, yang merekrutnya adalah universitas, Pak. Kita bekerja sama dengan kita membentuk Forum Pertides yang namanya Perguruan Tinggi untuk Desa. Sekarang sudah ada 100 perguruan tinggi yang bergabung. Jadi mereka yang melakukan seleksi, supaya saya harapkan lebih independen. Tapi kenyataannya ya masih, kalau yang gubernurnya dari partai tertentu, ya masih lebih banyak yang dari partai tertentu. Nah tahun ini saya bikin lebih baik lagi Pak, dengan provinsi yang merekrut, melalui universitas yang melakukan seleksi. Juga saya lakukan secara online. Jadi kalau online kan tidak bisa diintervensi. Nah mudah-mudahan ini bisa lebih, tapi kita terus adakan ... dan setiap 6 bulan pendamping desa itu direview, Pak. Setiap

tahun saya memberhentikan karena laporan itu hampir 1000 pendamping, Pak. Jadi kalau pendamping desanya tidak *qualified* atau Bapak-bapak melihat ada pendamping desa yang tidak *qualified*, dilaporkan saja ke kita. Kalau Bapak bisa langsung ke kita, kalau konstituen Bapak bisa melaporkan ke Satgas Dana Desa di nomor 1500040, itu kalau nanti kita audit, ternyata laporan itu benar, kita berhentikan. Karena itu kontrak mereka setiap 6 bulan direview.

F- PG (Drs. HAMKA BACO KADY, MS):

Tapi itu ada saja ya Pak?

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI:

Setiap tahun hampir 1000 yang selalu saya berhentikan, saya ...

KETUA RAPAT:

Pak Menteri,

Mengingatkan waktunya, ini ada kesimpulan yang harus kita baca.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI:

Jadi mungkin dari saya itu saja Pak. Jadi nanti detailnya mengenai locus dan sebagainya, tolong direview dari data yang sudah kita kasih itu belum final, tapi juga kita ada locus yang sudah ditentukan oleh Bappenas. Tapi ya itu, kelengkapan dokumen sama TA-nya saya minta untuk lebih proaktif.

Demikian.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Demikian penjelasan panjang lebar dari Pak Menteri.

Saya kira kita tampilkan dulu kesimpulan yang jumlahnya Cuma dua, biar kita bisa lebih cepat, karena yang paling kita inginkan nanti ada sinkronisasi antara usulan anggota dan lokasi dan program yang Pak Menteri sudah buat.

Bisa ditayangkan?

DRAFT KESIMPULAN RAPAT KERJA KOMISI V DPR RI DENGAN KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI RABU, 5 SEPTEMBER 2018

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terhadap alokasi anggaran APBN Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, pagu kebutuhan Rp4.545.623.104,00.
Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2019 Rp4.325.623.104,00
Ada kekurangan Rp220 miliar.
Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi akan memperjuangkan kekurangan anggaran sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.
2. Komisi V DPR RI dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sepakat bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat serta program-program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di kabupaten atau kota tertentu, akan disesuaikan dengan saran, pendapat dan usulan Komisi V DPR RI sebagaimana yang disampaikan dalam rangkaian rapat Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2019, serta disesuaikan dengan hasil pembahasan alokasi anggaran untuk fungsi dan program masing-masing unit Eselon I, dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2019, pada RDP mendatang.

Sudah dipahami ya?

Jadi kami tanyakan kepada anggota, kalau memang anggota sudah setuju, kita akan minta kepada Pemerintah.

Ada catatan dari anggota?

F- PG (Drs. HAMKA BACO KADY, MS):

Sebelum ke Pemerintah, ijin tambahan saja Pak Menteri.

Saya kira apa yang disampaikan tadi sebagai kesimpulan sudah bagus, walaupun tidak ditayangkan, kita bisa paham.

Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri menyesuaikan materi ini, tentu ada *deadline* yang diinginkan. Tolong disampaikan kepada kami nanti, kapan itu, supaya seluruh dokumen pendukung untuk membuat semua ini bisa berjalan dengan baik, kira-kira kapan itu, sehingga TA-TA juga kami segera menghubungi Bapak-Bapak sekalian, untuk mensinkronkan waktu *time table* tadi yang dimaksud oleh Pak Menteri.

Dan yang terakhir, apa yang disampaikan dalam buku ini, locusnya nanti masih kita bicarakan secara teknis di pendalaman nanti di Eselon I. Misalnya penempatan BUMDes, penempatan modal usaha, seperti apa yang disampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya kira anggota setuju ya terhadap draft kesimpulan?

Saya persilakan kepada Pak Menteri untuk merespon draft kesimpulan ini, ada yang bisa *dienrichment*, diperkaya atau di,

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI:

Setuju, Pak.

KETUA RAPAT:

Saya kira demikian, Pemerintah setuju. Kita ketok.

(RAPAT: SETUJU)

Dan kita sampai pada akhir rapat kita, yang memakan waktu 3 jam 10 menit, termasuk cepat ya? Dan apresiasi teman-teman kepada Pak Menteri, rasanya sudah sangat bagus ya. Terima kasih.

Demikian, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu anggota Komisi V yang berbahagia. Kita dengar dulu *closing statement* dari Pak Menteri. Silakan Pak Menteri.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI:

Pimpinan dan seluruh anggota Komisi V yang saya hormati,

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama baik yang ada selama ini.

Saya juga mengapresiasi ... *understanding* yang kita lebih baik, jadi ini terus akan kita tingkatkan Pak. Jadi kalau ada keluhan-keluhan atau kekurangan-kekurangan terhadap seluruh staf saya, saya sudah tinggalkan nomor telepon saya di Sekretariat Komisi V, Bapak-Bapak bisa langsung *whatsapp* ke saya. Dan Insya Allah kalau *whatsapp* ke saya, saya pasti akan respon. Prinsip saya, selama tidak melanggar aturan, saya pasti dukung, karena *interest* kita sama Pak, membantu masyarakat desa. Keberhasilan Bapak menjadi keberhasilan saya semua. Jadi jangan segan-segan untuk *whatsapp*. Karena sudah lebih banyak Pak, yang langsung *whatsapp* ke saya, dan Bapak bisa tanyakan, yang *whatsapp* ke saya langsung saya respon dengan lebih cepat.

Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan demikian kita tutup acara kita kali ini dengan ucapan *Alhamdulillahirrabbi alamin.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.36 WIB)